

**PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh:

**RESMINA RAMBE
NIM 19 402 00241**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh:

**RESMINA RAMBE
NIM 19 402 00241**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKEKIMADUKOTA
PADANGSIDIMPUAN



SKRIPSI

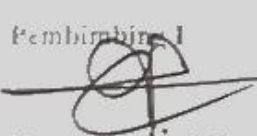
*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

RESMINA RAMBE

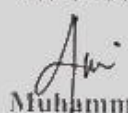
NIM. 19 402 00241

Pembimbing I


Hammi Fadhilah Nasution, M.Pd
NIP. 198303172018012001

Acc disdangku

Pembimbing II

 23/09-25.
Muhammad Arif, M.A
NIP. 199501142022031003

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025

Hal: Skripsi
An. Resmina Rambe

Padangsidempuan, 01 Desember 2025

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan
Di-Padangsidempuan

Assalāmu 'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Resmina Rambe yang berjudul **"Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidempuan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut dapat menjalani sidang munaqosyah untuk mempertanggung jawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

PEMBIMBING I



Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 198303172018012001

PEMBIMBING II



Muhammad Arif, M.A
NIP. 199501142022031003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Resmina Rambe
NIM : 19 402 002 41
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 ayat 11 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 22 Desember 2025
Saya yang Menyatakan,



RESMINA RAMBE
NIM. 19 402 002 41

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Resmina Rambe
NIM : 19 402 002 41
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota PadangSidempuan"**. Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 22 Desember 2025
Saya yang Menyatakan,



RESMINA RAMBE
NIM. 19 402 002 41



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI
SYEKHALIHASANAHMADADDARYPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin KM 4,5 Sititang, Padangsidempuan 22733 Telepon:
(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : RESMINA RAMBE
NIM : 1940200241
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidempuan

Ketua

Arwar Hamid, M.A
NIDN. 2111038601

Sekretaris

Muhamad Arif, M.A
NIDN. 2014019502

Anggota

Arwar Hamid, M.A
NIDN. 2111038601

Muhamad Arif, M.A
NIDN. 2014019502

Dr. Rosnani Siregar, M. Ag
NIDN. 2006118105

Nofina wati, M.A
NIDN. 2016118202

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/18 Desember 2025
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/77,25 (B)
Indeks Predikat Kumulatif : 3.17
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan, T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733

Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Website: www.uinsyahada.co.id

PENGESAHAN

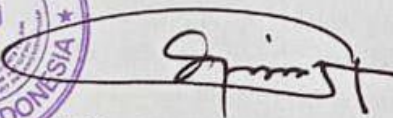
Judul Skripsi : **Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota
Padangsidimpuan**
Nama : **Resmina Rambe**
NIM : **19 402 00241**
Indeks Prestasi Kumulatif : **3.16**
Predikat : **Sangat Memuaskan**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 11 Februari 2026

Dekan,




Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Resmina Rambe

NIM : 19 402 00241

Judul : Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan

Meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, serta perubahan tata ruang Kota Padangsidempuan telah berdampak pada menjamurnya masyarakat yang bekerja di sektor informal, khususnya sebagai pedagang kaki lima (PKL). Berdasarkan data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Padangsidempuan berusia 15 tahun ke atas, pada Agustus 2023 tercatat sebanyak 9.061 orang atau 7,57 persen, menurun 0,19 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Namun demikian, angka tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum terserap dalam sektor formal sehingga banyak yang beralih ke sektor informal seperti pedagang kaki lima. Keberadaan PKL di berbagai titik strategis kota menimbulkan persoalan seperti kemacetan, ketidaktertiban, dan penurunan estetika kota. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pemberdayaan PKL agar lebih tertata, produktif, dan mandiri secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan serta mengidentifikasi hambatan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah pedagang kaki lima (PKL) yang berlokasi di jalan Thamrin, jalan Patrice Lumumba, dan jalan Mongonsidi, Kota Padangsidempuan, Sumatra Utara. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan selama penelitian, serta teknik triangulasi waktu yang bertujuan untuk meningkatkan keakuratan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan masih belum berjalan secara optimal. Program-program yang dijalankan belum sepenuhnya menjangkau seluruh PKL, baik dalam hal pembinaan, penyediaan lokasi usaha, maupun permodalan. Namun demikian, para pedagang menunjukkan antusiasme dan kemauan kuat untuk berkembang apabila mendapatkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan pihak terkait.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemberdayaan, Modal

ABSTRAK

Nama : Resmina Rambe

NIM : 19 402 00241

Judul : Empowerment of Street Vendors in Padangsidempuan City

The increase in unemployment and poverty rates, along with changes in the urban spatial structure of Padangsidempuan City, has contributed to the growth of informal sector employment, particularly street vendors. Based on data on the Open Unemployment Rate (OUR) in Padangsidempuan City for the population aged 15 years and above, as of August 2023, there were 9,061 unemployed individuals or 7.57 percent, representing a decrease of 0.19 percentage points compared to August 2022. Nevertheless, this figure indicates that a portion of the population has not been absorbed into the formal sector, leading many to shift to informal employment such as street vending. The presence of street vendors in various strategic areas of the city has resulted in several issues, including traffic congestion, disorderliness, and a decline in urban aesthetics. These conditions highlight the need for empowering street vendors to become more organized, productive, and economically independent. This study aims to examine the empowerment of street vendors in Padangsidempuan City and to identify the obstacles to their empowerment. This research employs a qualitative approach. The subjects of the study were street vendors located on Thamrin Street, Patrice Lumumba Street, and Mongonsidi Street in Padangsidempuan City, North Sumatra. Data were collected through observation, structured interviews, and documentation. Data validity was ensured through prolonged engagement, persistent observation throughout the research process, and time triangulation techniques to enhance data accuracy. The findings indicate that efforts to empower street vendors in Padangsidempuan City have not yet been implemented optimally. The existing programs have not fully reached all street vendors, particularly in terms of guidance, provision of business locations, and access to capital. However, the vendors demonstrated strong enthusiasm and willingness to develop, provided that they receive continuous support from the government and relevant stakeholders.

Keywords: Street Vendors, Empowerment, Capital

المخلص

الاسم: رسمينا ريب

الرقم الجامعي: ١٩٤٠٢٠٠٠٢٤١

العنوان: نكلي الباعة المتجول في مدينة بادانغ سيديمبوان

أدى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، إلى جانب التغيرات في التخطيط العمراني لمدينة بادانغ سيديمبوان، إلى تزايد عدد العاملين في القطاع غير الرسمي، ولا سيما الباعة المتجول. واستنادا إلى بيانات معدل البطالة المفتوحة في مدينة بادانغ سيديمبوان للفئة العمرية ١٥ سنة فأكثر، سُجِّلَ في أغسطس سنة ٢٠٢٣ عدد ٩,٠٦١ شخصا أو ما يعادل ٧,٥٧٪، بانخفاض قدره ١٩,٠١ نقطة مئوية مقارنة بأغسطس ٢٠٢٢. ومع ذلك، فإن هذه النسبة لا تزال تشير إلى أن جزءا من السكان لم يتم استيعابه في القطاع الرسمي، مما دفع العديد منهم إلى العمل في القطاع غير الرسمي مثل الباعة المتجول. وقد أدى انتشار الباعة المتجول في المواقع الاستراتيجية بالمدينة إلى ظهور مشكلات، من بينها الازدحام المروري، وعدم الانتظام، وتراجع جمالية المدينة. وتبرز هذه الظروف الحاجة إلى تمكين الباعة المتجول ليكونوا أكثر تنظيما وإنتاجية واستقلالا من الناحية الاقتصادية

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة جهود تمكين الباعة المتجول في مدينة بادانغ سيديمبوان، وكذلك تحديد معوقات تمكينهم. ويعد هذا البحث من نوع البحث النوعي، وكان موضوع الدراسة هم الباعة المتجولون الواقعون في شارع ثامرين، وشارع باتريس لومومبا، وشارع مونغونسيدي بمدينة بادانغ سيديمبوان، شمال سومطرة. وجمعت البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات المنظمة، والتوثيق. أما تقنيات التحقق من صحة البيانات فشملت إطالة فترة المشاركة، ودقة الملاحظة أثناء البحث، وتقنية التثليث الزمعي بهدف تعزيز دقة البيانات

وأظهرت نتائج الدراسة أن جهود تمكين الباعة المتجول في مدينة بادانغ سيديمبوان لم تُنفذ على النحو الأمثل بعد، حيث إن البرامج المنفذة لم تصل بشكل كامل إلى جميع الباعة المتجول، سواء في مجالات التوجيه، أو توفير مواقع العمل، أو رأس المال. ومع ذلك، أبدى الباعة المتجولون حماسا واستعدادا قويا للتطور في حال حصولهم على دعم مستدام من الحكومة والجهات المعنية

الكلمات المفتاحية: الباعة المتجولون، التمكين، رأس المال

KATA PENGANTAR



Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidimpuan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Kemudian Shalawat beriring salam peneliti haturkan kepada ruh Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dan rahmat bagi seluruh alam. Selama menyusun skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bantuan dari berbagai sumber baik berupa moral maupun materi, karena itu dengan tanpa mengurangi rasa hormat serta rasa syukur atas semuanya itu dalam kesempatan ini tak lupa peneliti sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, Bapak Prof. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ha. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama..

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari, M.A., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan jajarannya di program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.
4. Bapak Adanan Murroh Nasution, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
5. Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku Pembimbing I dan pak Muhammad Arif, M.A M.Si selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala UPT Pusat Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak serta Ibu Dosen dan Pengawai UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
8. Teristimewa kepada keluarga tercinta yang paling berjasa dan paling peneliti sayangi dalam hidup ini. Terutama untuk Orangtua Kandung.
9. Teruntuk sahabat-sahabat peneliti seluruhnya yang telah memberikan dukungan, motivasi dan saran-saran kepada peneliti. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudah segala urusan kita. Aamiinnn.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padangsidimpuan, November 2025 Peneliti,

Resmina Rambe
NIM.19 402 00241

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Es dan ye
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dommah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di bawah
	<i>dommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah hidup*

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah mati*

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

/h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tsaydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*.

Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu

disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab- Latin*. Cetekan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Istilah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	13
1. Pemberdayaan.....	13
a. Pengertian Pemberdayaan	13
b. Tujuan Pemberdayaan.....	20
c. Manfaat Pemberdayaan	20
d. Tahapan Pemberdayaan	21
e. Pemberdayaan Daerah.....	22
f. Indikator Keberhasilan Pemberdayaa.....	23
g. Pemberdayaan Ekonomi Menurut Pandangan Islam.....	24
2. Pedagang kaki lima.....	27
a. Pengertian Pedagang kaki lima	27
b. Karakteristik Pedagang kaki lima	27
c. Kekuatan dan kelemahan Pedagang kaki lima	29
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pedagang kaki lima	30
B. Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan waktu penelitian.....	36
B. Jenis penelitian	36
C. Subjek penelitian.....	36
D. Sumber data.....	37
E. Teknik pengumpulan data	38
1) Observasi.....	38
2) Wawancara.....	38
3) Dokumentasi	39
F. Teknik penjamin keabsahan data	40
G. Teknik pengilahan dan anlisis data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Objek Penelitian	46
1. Letak Geografis Kota Padangsidimpuan	46

2. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan Utara.....	47
B. Deskripsi Data Penelitian	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	72
D. Keterbatasan Peneliti.....	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	34
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kesehariannya, manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhannya agar dapat melangsungkan kehidupan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara bekerja. Pada konteks Islam tentang perekonomian (*iqtishadiyah*), bekerja adalah modal dasar ajaran Islam itu sendiri. Sehingga disebutkan seorang muslim yang bekerja adalah orang mulia, sebab bekerja adalah bentuk ibadah yang merupakan kewajiban setiap orang yang mengaku mukmin. Namun, dalam bekerja juga harus disertai dengan niat yang benar tanpa ada paksaan sehingga bekerja bisa maksimal dan terhindar dari yang tidak halal. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bekerja memberikan makna ketika yang dilakukan memberikan dampak secara fisik dan emosi. Fokus bekerja sebenarnya bukan hanya ekonomi tetapi juga sebagai bagian dari manusia untuk mendapatkan harkat kemanusiaannya. Disamping itu, bekerja juga bisa digunakan untuk sarana pembuktian diri sebagai pribadi yang mandiri.¹

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, yang mengelompokkan negara menurut tingkat kesejahteraan penduduknya. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, kegiatan usaha sektor informal sangat menjanjikan. Ini berfungsi untuk memberikan kesempatan kerja dengan menyerap energi dan bekerja secara mandiri. Pendapatan dari pedagang kaki

¹ Rokhim, F., dan Handoyo, P., 2019, Makna Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Yayasan Bina Karya "Tiara Handicraft" Surabaya, *Jurnal Paradigma*. Vol 03, No 03, hlm. 1-9

lima ini bukanlah dariupah yang merekaterima setiap bulannya seperti parapekerja formal yang gaji atau upahnya telah ditentukan dan diintervensi oleh pemerintah dengan menggunakan peraturan Upah Minimum melainkan penghasilan yang diperoleh oleh lepas dari campur tangan pemerintah dan kebanyakan diperoleh perhari dengan ketidakpastian pendapatan yang diperolehnya.² Terkadang mereka tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Kurangnya dukungan yang diberikan pemerintah kepada pedagang di sektor informal dan hambatan bagi upaya mereka untuk maju dan berkembang. Membekaknya sektor informal mempunyai kaitannya dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam menyerap pertambahan angkatan kerja di kota. Sedangkan pertambahan angkatan kerja di kota yaitu sebagai akibat imigrasi dari desa ke kota lebih pesat dari pada pertumbuhan kesempatan kerja. Akibatnya, terjadi pengangguran terutama dikalangan penduduk usia muda dan terdidik dengan membengkaknya sektor informal di kota.

Adapun beberapa jenis pekerjaan yang termasuk didalam sektor informal, salah satunya adalah pedagang kaki lima, seperti warung nasi, penjual rokok, penjual koran, majalah, penjual makanan ringan, minuman, dan lain sejenisnya. Selain itu biasanya pedagang kaki lima umumnya berdagang di taman, trotoar, halte, bus dan lain-lain. Peran usaha kecil pada dasarnya berlangsung dalam kondisi pasang surut yang salah satunya diakibatkan oleh ruang publik yang terlihat kumuh sehingga tidak lagi nyaman untuk bersantai atau berkomunikasi. Selain itu pasang surutnya pedangang kaki lima seirama dengan perkembangan

² Rokhimah, dkk, "Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima Selama Masa Pembukaan Alun-Alun Aimas Kabupaten Sorong," *Jurnal Kalianda Halok Gagas* Vol 5, No 2, Januari 2023, hlm. 137.

masyarakat dan dinamika pembangunan ekonomi. Pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di ruas pejalan kaki ini tidak mematuhi kegunaan ruas pedestrian sesuai fungsinya. Sehingga secara tidak teratur memanfaatkan jalur pejalan kaki (pedestrian) untuk bergadag yang mengakibatkan jalur pejalan kaki menjadi berkurang.³ Dimana berpedoman pada ciri-ciri utama usaha kecil yaitu meliputi kegiatan usaha dengan modal utama kemandirian masyarakat, bahan baku untuk sebagian besar bisnis memanfaatkan sumber daya lokal, pendidikan dan kualitas sumber daya pedagang tergolong rendah, dan melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Kota Padangsidempuan memiliki peranan dan fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat aktivitas perdagangan dan jasa, serta pusat pendidikan. Kota Padangsidempuan memiliki potensi dalam perdagangan, begitu juga dengan kota-kota lain. Pedagang kaki lima telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran menjadi lebih rendah. Pedagang kaki lima yang dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harganya yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun keberadaan pedagang kaki lima selain bermanfaat bagi masyarakat juga menguntungkan bagi pedagang kaki lima.

Pemerintah Daerah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Sehingga kebijakan tersebut bersifat satu arah. Kebijakan merupakan sebuah aturan dari Pemerintah Daerah yang harus diikuti oleh siapapun tanpa terkecuali,

³ Yohanes Cristanto Nugraha, Pemanfaatan Ruang Publik Pedestrian Sebagai Tempat Berdagang Bagi Pedagang Kaki Lima (Studi Di Kawasan Pedestrian Sudirman Kota Palembang, *(Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2021)*, hlm. 5

kebijakan tersebut diberlakukan agar tercipta suatu peraturan yang dapat membuat masyarakat patuh terhadap kebijakan yang sudah dibuat.

Bertambahnya angka pengangguran, kemiskinan dan berubahnya tata ruang kota, memiliki dampak negatif yaitu menjamurnya masyarakat yang memiliki pekerjaan pada sektor informal. Sebagian mata pencaharian masyarakat Padangsidempuan yaitu pada sektor perdagangan, dilihat dari banyaknya jumlah pedagang di berbagai Wilayah Kota Padangsidempuan salah satunya menjadi pusat berkumpulnya pedagang kaki lima yaitu di sekitaran jalan Thamrin, Patrice Lumumba dan Mongonsidi, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara.

Berdasarkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk umur 15 tahun keatas Kota Padangsidempuan, terlihat frekuensi jumlah produksi pengangguran dari tahun 2021-2022. Pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 9.061 orang (7,57 persen), turun sebesar 0,19 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Sedangkan pada tahun 2021 lebih rendah yang dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Padang Sidempuan pada Agustus 2021 sebesar 7,18 persen, turun sebesar 0,27 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020.⁴

Polres Padangsidempuan bersama TNI dan Satpol PP melakukan penertiban pembongkaran lapak pedagang kaki lima (PKL) dengan humanis, yang berjualan di sepanjang Jalan Thamrin, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Penertiban tersebut, berdasarkan keluhan masyarakat, dimana keberadaan para PKL kerap menimbulkan kemacetan dikarenakan memakai kedua sisi jalan, sehingga arus lalu lintas

⁴ Badan Pusat Statistik, Padangsidempuan, 30 Mei 2024.

kendaraan sepeda motor dan mobil sering terjadi kemacetan. "Kegiatan pembersihan jalan dan lapak PKL di kawasan Jalan Thamrin dan sekitarnya, sebelumnya tim terpadu sudah melakukan pendekatan kepada PKL tersebut".

Satpol PP telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan bahkan sudah ada Surat Himbauan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 510/1138/2023 tentang larangan berjualan di sepanjang Jalan Thamrin, Jalan Patrice Lumumba, dan Jalan Mongonsidi. Namun, ratusan pedagang mendatangi Kantor Wali Kota Padang Sidempuan sambil membawa dagangan mereka, seperti sayuran dan barang dagangan lainnya, yang sebagian besar dipegang oleh kaum ibu. Salah satu pedagang kaki lima di Jalan Thamrin, menyampaikan aspirasinya kepada wartawan bahwa mereka merasa sangat dirugikan karena tidak bisa berjualan setelah Satpol PP dan tim gabungan serta ratusan ASN Kota Padang Sidempuan menggusur dan membersihkan lapak pedagang. Menurut paparan pedagang kaki lima mereka mengalami kerugian hingga ratusan ribu rupiah karena barang dagangan mereka tidak bisa dijual, terbuang sia-sia, dan berpotensi membusuk".⁵

Ada beberapa alasan mengapa para pedagang kaki lima seringkali memilih untuk kembali berjualan di trotoar meskipun sudah ada tempat yang disediakan pemerintah:

⁵ Anisah Chulistia, Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan, Wawancara Pukul 10:45 WIB, 07 April, 2025.

1. **Aksesibilitas dan Lokasi:** Lokasi di trotoar seringkali berada di tempat yang strategis dan ramai, seperti di dekat pusat perbelanjaan, sekolah, atau kantor. Hal ini memberikan visibilitas dan akses yang lebih baik kepada pelanggan. Tempat yang disediakan pemerintah mungkin berada di lokasi yang kurang strategis atau jauh dari keramaian, sehingga mengurangi jumlah pengunjung.
2. **Biaya dan Beban:** Beberapa tempat yang disediakan pemerintah mungkin memerlukan biaya sewa atau izin yang tidak terjangkau bagi pedagang kaki lima. Selain itu, ada kemungkinan ada aturan atau persyaratan tambahan yang menyulitkan mereka untuk beroperasi di lokasi tersebut.
3. **Kebiasaan dan Kenyamanan:** Banyak pedagang kaki lima sudah terbiasa dengan lokasi mereka di trotoar dan mungkin memiliki sistem atau infrastruktur yang sudah terbentuk, seperti tempat penyimpanan barang atau koneksi dengan pelanggan tetap. Perpindahan ke lokasi baru memerlukan adaptasi dan bisa menambah beban bagi mereka.
4. **Kurangnya Sosialisasi atau Komunikasi:** Ada kemungkinan bahwa pedagang kaki lima tidak sepenuhnya mendapatkan informasi tentang keberadaan atau keuntungan dari tempat yang disediakan pemerintah. Sosialisasi yang kurang baik dari pihak berwenang bisa membuat mereka tidak tertarik untuk pindah.
5. **Ketersediaan Fasilitas:** Tempat yang disediakan pemerintah mungkin tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk kebutuhan pedagang kaki lima, seperti area untuk penyimpanan barang, tempat duduk, atau fasilitas sanitasi.

6. Ketidakpastian dan Keamanan: Beberapa pedagang mungkin merasa lebih aman berjualan di lokasi yang sudah mereka kenal daripada pindah ke lokasi baru yang mungkin tidak memberikan jaminan keamanan atau perlindungan yang sama.
7. Kesulitan Dalam Proses Administrasi: Kadang-kadang proses untuk mendapatkan izin atau mengakses tempat yang disediakan pemerintah bisa rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga para pedagang lebih memilih tetap di lokasi lama yang mereka anggap lebih praktis.

Fakta di atas mengindikasikan bahwa pesatnya pertumbuhan pedagang Kota Padangsidempuan menyebabkan jalan di sekitaran jalan Thamrin, jalan Patrice Lumumba dan jalan Mongonsidi menjadi sangat padat dan tentunya mengganggu aktivitas lalu lintas, pejalan kaki dan bahkan toko - toko yang berada persis di pinggir jalan. Pemberdayaan Pedagang Kaki lima di Kota Padangsidempuan harus dikaji lebih dalam oleh pemerintah Kota Padangsidempuan untuk mengetahui semakin banyaknya jumlah pedagang yang berada di jalan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan tema yang sama diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nabila dkk berpendapat bahwa pedagang yang mendapatkan pembinaan, pendampingan dan evaluasi rutin dari pemerintah sehingga mengalami peningkatan pendapatan. Temuan ini menunjukkan potensi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui perbaikan dalam manajemen,

promosi, dan dukungan pemerintah dan swasta”.⁶ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yonan Bastiar Dkk dalam temuannya menjelaskan bahwa penurunan pendapatan akibat Covid-19 dan selain itu di sisilain pada saat covid-19 kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang yang menjadi penompang perekonomian.⁷ Gelar Faruq dan Tirton Nefianto memaparkan faktor penghambat pemberdayaan pedagang kaki lima adalah karena adanya penolakan dan tidak tersedianya tempat alternatif untuk para pedagang berjualan,⁸ selain itu Pramono dan Hanandini berpendapat bahwa beberapa pemerintah kot menghadapi dilema, tahap penyelesaian masalah PKL, hal ini membuat beberapa pemerintah kota membuat kebijakan khusus untuk penataan dan pemberdayaan.⁹

Pemerintah Kota Padangsidempuan perlu melakukan peninjauan ulang terkait prosedur penertiban Pedagang Kaki Lima. penertiban dapat di lakukan dengan cara pemberdayaan dan juga sosialisasi serta tarif tarif kios yang di keluarkan setiap harinya sesuai dengan omset yang di dapatkan dan inilah yang menjadi permasalahan inti dari penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian mengenai, **“Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidempuan.**

⁶ Nabila, Aisya Safira, and Ertien Rining Nawangsari. “Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sentra Wisata Kuliner Wiyung Kota Surabaya”. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 8.1 (2022): 135-144.

⁷ Yonan Bastiar Dkk, (2022). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2022. *Jurnal GOVERNANSI*, 8(2): 79-90.

⁸ al Fayyadl, G. F., & Nefianto, T. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. *Res Publica: Journal of Social Policy Issues*, 1(1), 28-38.

⁹ Indraddin, W. P., & Hanandini, D. (2022). Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Kepentingan Pedagang, Ketertiban dan Keindahan Kota. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 12(1).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dilihat bahwa permasalahan dari topik penelitian sangat luas sehingga perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini hanya difokuskan pada pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pengertian istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah yaitu:

1. Pemberdayaan yang dimaksud dari penelitian ini penataan Pedagang Kaki lima mengupayakan untuk penataan dan menertipkan Pedagang Kaki lima. Tujuan dari penataan Pedagang Kaki lima ini adalah untuk menciptakan ketertipan dan keindahan kota
2. Pedagang Kaki Lima adalah istilah untuk menyebut dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis menyimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan dalam ekonomi?

2. Apa saja hambatan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas penulis menyimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan dalam ekonomi.
2. Untuk mengetahui hambatan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Padangsidempuan dan dapat dimanfaatkan sebagai acuan atau referensi bagi para peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dokumentasi atau arsip di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

b. Bagi Akademik

Penelitian ini adalah proses pembelajaran agar dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan mengenai bagaimana Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Padangsidempuan. Serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama ini. Dari hasil penelitian

yang dilakukan peneliti semoga bisa menjelaskan wawasan kasus-kasus nyata dilapangan.

c. Bagi Peneliti

Adapun dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan menambah wawasan atau pengetahuan dan pengalaman terkait Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan peneliti untuk mempermudah peneliti dalam menyusun proposal skripsi. Peneliti mengklasifikasikan sistematika pembahasan kedalam tiga bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan membahas tentang yang melatar belakangi suatu masalah untuk di teliti.

BAB II LANDASAN TEORI, merupakan bab yang membahas tentang tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir. Secara umum, seluruh sub bahasan yang terdapat dalam landasan teori ini membahas tentang penjelasan mengenai teori penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian, lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data. Secara Umum seluruh sub bahasan yang ada dalam metode penelitian serta membahas tentang lokasi serta jenis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, hasil penelitian yang di dalamnya tercantum pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini berisi tentang kesimpulan dalam penelitian ini dan saran peneliti terhadap fenomena yang terjadi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pemberdayaan

a) Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan bila dilihat dari akar katanya, “daya” merupakan kata dasar yang ditambah awalan “ber”, yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga/kekuatan, maka arti dari kata berdaya adalah memiliki tenaga/kekuatan. Maka, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan.³ Dalam “kamus Besar Bahasa Indonesia”, istilah pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau bertindak, mendayagunakan berarti mengusahakan agar mampu mendatangkan hasil. Pemberdayaan perempuan terutama di daerah pedesaan menjadi salah satu sasaran yang gencar digulirkan oleh pemerintah, apalagi dengan adanya dengan isu kemiskinan yang paling banyak dialami daerah pedesaan. Oleh karena itu, perlu memberdayakan perempuan dan potensi perempuan pedesaan. Sedangkan dalam judul proposal ini pemberdayaan yang dimaksud yaitu usaha atau cara dari seseorang atau kelompok dalam hal ini adalah pemerintah untuk memberikan kekuatan berupa materiil maupun non materiil kepada seseorang atau

³ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin, “*Pemberdayaan Masyarakat*”, (Yogyakarta: Publisher, 2019), hlm. 1.

kelompok yang lemah di dalam masyarakat agar mereka bisa meningkatkan kemampuan yang ada pada dirinya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Teori pemberdayaan menurut Stewart dalam buku *Empowering people* yang menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan cara amat praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari diri kita sendiri dan dari anggota kita. Adapun kaitannya dengan ekonomi syariah adalah bahwa untuk tetap kuat dan berpegang pada keimanan juga dapat diterapkan dalam praktek ekonomi syariah, pelaku ekonomi syariah dianjurkan untuk melakukan usaha dan kegiatan ekonomi dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Dengan adanya pemberdayaan seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam upaya memberdayakan ekonomi keluarga/masyarakat.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S Ali Imran ayat 139:

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغُلَاظُ وَإِنَّكُمْ مُّؤْمِنُونَ ۚ

Artinya: *janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.*⁴

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwa untuk tidak berputus asa atau merasa lemah di dalam menghadapi berbagai tantangan atau kesulitan. Sebaliknya ayat ini mengajak untuk mempertahankan kekuatan,

² Zulkaidir, *Tafsir Zulkaidir*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2021), hlm. 56

dan keyakinan, karena sebagai orang beriman kita seharusnya memiliki derajat dan martabat yang tinggi. Kaitannya dengan judul skripsi peneliti yaitu sebagai dorongan dan motivasi bagi kelompok wanita tani untuk terus berjuang dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan di dunia pertanian, mereka harus tetap kuat, pantang menyerah, dan mempertahankan keyakinan bahwa mereka memegang peran penting dalam memajukan ekonomi masyarakat melalui sektor ekonomi. Kaitannya dengan ekonomi syariah adalah bahwa untuk tetap kuat dan berpegang pada keimanan juga dapat diterapkan dalam praktek ekonomi syariah, pelaku ekonomi syariah dianjurkan untuk melakukan usaha dan kegiatan ekonomi dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata *power* yang artinya kekuasaan atau *kebeirdayaan*. Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.⁵ Dari berbagai pandangan tersebut terlihat jelas bahwa konsep pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun semua lapisan masyarakat. Maka dari itu diambil rumusan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan

³ Zulkaidir, *Tafsir Zulkaidir*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2021), hlm. 56

rancangan pembangunan melalui proses pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya yang melibatkan seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat diberbagai bidang. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikikan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁶

Menurut Gajanayake pemberdayaan adalah konsep di atas partisipasinya, yang terpenting darinya adalah upaya untuk membantu orang dalam membebaskan diri secara fisik dan mental.⁷ Kemudian pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Chambers dan Effendi. Menurut Cahmber pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered*, *participatory*, *empowerment*, dan *sustainable*, lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata hanya memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative

⁶ Zubedi, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta; Prenadamedia Grup, 2016) hlm 24

⁷ Gajanayake, H. (2019, July 17). *Medium*. Diambil kembali dari Medium: <https://uxplanet.org/principles-of-design-thinking-stages-of-design-thinking-b2cc219063ac>, hlm, 34.

pertumbuhan ekonomi local.⁸

Peoplecentered atau pembangunan yang berpusatkan pada rakyat, diawali dengan pemahaman tentang ekologi manusia, yang menjadi pusat perhatian pembangunan. Pembangunan haruslah menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang efektif terkait pengetasan masalah sosial melalui *people centered development* guna memaksimalkan pembangunan. (*People Centered Development*) ini, adalah suatu alternatif baru untuk meningkatkan hasil produksi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sangat banyak dan terus bertambah Seiring dengan pembangunan global dewasa ini, harus dipahami sepenuhnya bahwa pembangunan manusia menjadi agenda penting dengan semakin besarnya perhatian yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, demokratisasi dan *civil society*.⁹

(*Participatory Action Research*) adalah partisipatif dalam arti bahwa ia sebuah kondisi yang diperlukan dimana orang memainkan peran kunci di dalamnya dan memiliki informasi yang relevan tentang sistem sosial (komunitas) yang tengah berada di bawah pengkajian, dan bahwa mereka berpartisipasi dalam rancangan dan implementasi rencana aksi itu

⁸ Efri Samsul Bahri, “Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan”, (Kediri: FAM Publishing, 2019), hlm. 9.

⁹ Siti Saskia Fernandya Dkk, ” Pengentasan Masalah Sosial Melalui *People Centered Development* Guna Memaksimalkan Pembangunan di Indonesia ”, *Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), hlm, 121- 132

didasarkan pada hasil penelitian.

Paradigma PAR (*Participatory Action Research*) merubah cara berfikir kita tentang penelitian dengan menjadikan penelitian sebuah proses partisipasi. PAR (*Participatory Action Research*) itu sendiri adalah sebuah kondisi yang diperlukan dimana orang memainkan peranan kunci di dalamnya dan memiliki informasi yang relevan tentang sistem sosial atau komunitas, yang tengah berada di bawah studi. „*Subyek*” penelitian lebih baik untuk dirujuk atau menjadi rujukan sebagai anggotaanggota komunitas, dan mereka berpartisipasi dalam rancangan, implementasi, dan eksekusi penelitian.¹⁰

Empowerment sebagai proses dimana pimpinan berusaha membantu bawahan untuk mendapatkan dan menggunakan power yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang mempengaruhi kondisi kerja dan keadaan diri bawahan. Ketika kondisi *empowerment* terbentuk, motivasi pada individu dengan sendirinya ikut berkembang. Motivasi itu sendiri, tidak hanya dapat membangkitkan produktivitas, tapi juga mempengaruhi kemampuan dan menciptakan kondisi kerja yang kondusif. Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) adalah merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Adapun salah satu permasalahan yang masih terjadi

¹⁰ Abdul Rahmat, Mira Mirnawati, “Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat”, *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, hlm, 65.

dalam masyarakat Indonesia adalah rendahnya budaya literasi informasi.¹¹

Sustainable Architecture atau dalam bahasa Indonesianya adalah arsitektur berkelanjutan, adalah sebuah konsep terapan dalam bidang arsitektur untuk mendukung konsep berkelanjutan, yaitu konsep mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lebih lama, yang dikaitkan dengan umur potensi vital sumber daya alam dan lingkungan ekologis manusia, seperti sistem iklim planet, sistem pertanian, industri, kehutanan, dan tentu saja arsitektur. Sustainable design memiliki tiga pendekatan utama yang didefinisikan sebagai lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan pendekatan dari lingkungan dibagi menjadi lima prinsip, yaitu perencanaan tapak yang berkelanjutan, menjaga dan efisiensi air, efisiensi energi dan energi terbarukan, konservasi penggunaan material dan sumber daya, serta kualitas lingkungan dalam ruangan.¹²

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwasanya pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara menguatkan nilai-nilai masyarakat. Dengan pemberdayaan dapat membantu masyarakat untuk selalu bertanggungjawab dengan segala upaya yang diusahakan untuk masa depannya.

¹¹ Yunus Winoto, dan Tine Silvana Rachmawati, "Pemberdayaan Masyarakat (community empowerment) Melalui Pengelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA* 2017 ISBN 978-602-19411-2-6, hlm, 199.

¹² Omar, Osama. Halabi, Marwan. (2015) "*Ways Of Innovating In Education For Sustainable Design Principles*", diakses tanggal 17 Januari 2021, hlm, 04.

b) Tujuan Pemberdayaan

Suharto mengatakan dalam upaya peningkatan pemberdayaan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:¹³

Menciptakan keadaan atau suasana yang membuat adanya masyarakat tersebut berkembang (*enabling*). Poin utama disini ialah memberikan pemahaman bahwa dalam setiap masing-masing individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan, dapat dipahami bahwa tidak ada masyarakat yang benar-benar tidak berdaya.

- 1) Meningkatkan daya atau kekuatan yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Selain menciptakan keadaan atau suasana, dalam kasus ini diperlukan tindakan yang tepat.
- 2) Makna lain dari pemberdayaan sendiri ialah melindungi, dalam prosesnya pemberdayaan mencegah agar tidak membuat yang lemah semakin lemah.

c) Manfaat Pemberdayaan

Ada 3 manfaat utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan perlindungan terhadap masyarakat:

¹³ E. Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017). Vol. 6, No. 1, Februari 2020, hlm. 146.

- 1) Mengembangkan kemampuan masyarakat
- 2) Mengubah perilaku masyarakat
- 3) Perlindungan terhadap masyarakat

Pemberdayaan masyarakat juga bermanfaat untuk memotivasi dan memfasilitasi masyarakat memperbaiki diri, komunitas dan lingkungannya dalam mencapai tujuannya.

d) Tahapan Pemberdayaan

Menurut Kiki Endah dalam Moderat pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dengan melalui penerapan pendekatan yang disingkat 5P yaitu:¹⁴

- 1) Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara optimal. Jadi pemberdayaan harus membebaskan sesuatu yang terhambat dari diri masyarakat tersebut;
- 2) Penguatan, yaitu adanya penguatan pengetahuan dan kemampuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga masyarakat mampu berkembang dan percaya diri dengan segenap kemampuannya yang mana akan menunjang kemandirian masyarakat;
- 3) Perlindungan, yaitu adanya perlindungan terutama kelompok yang lemah dari kelompok yang kuat dan menghindari persaingan yang tidak

¹⁴ Kiki Endah, "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa", *Jurnal MODERAT*, VoL, 3, 2019, hlm, 56.

seimbang. Hal ini akan mencegah terjadinya penindasan dan eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah;

- 4) Penyokongan, yaitu adanya dukungan agar masyarakat mampu melakukan peranan dan tugasnya. Jadi pada intinya pemberdayaan mampu memberikan dukungan kepada masyarakat agar mereka mampu menjalankan tugasnya dan tidak merasa terpinggirkan;
- 5) Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan didtribusi sehingga setiap orang memiliki kesempatan berusaha. Istilah pemberdayaan sendiri dipakai untuk menggambarkan seorang individu seperti yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan setiap aktivitas individu-individu mempunyai kontrol di semua aspek kehidupan sehari-hari yang bertujuan sebagai bukti keberadaan dan keberdayaannya.

e) Pemberdayaan Daerah

Produk unggulan tidak harus berupa hasil industri dengan teknologi canggih atau dengan investasi tinggi, tetapi bisa berupa “produk lokal” dengan daya saing handal. Di samping itu, produk unggulan tersebut tidak harus lain daripada yang lain, tetapi bisa berupa *common product* dengan berbagai keunikan. Dengan kata lain, produk unggulan itu tidak harus berskala tinggi, tetapi bisa juga berada di daerah.

Bentuk kontribusi riil dari daerah bagi kepentingan Pembangunan pada skala makro bisa berbeda-beda, karena masing-masing daerah menyimpan kekuatan tersendiri yang berbeda-beda pula. Secara

ekonomis misalnya, ada daerah yang dapat menjadi lumbung beras atau sebagai salah satu penyangga *stock* pangan. Ada pula daerah yang potensial menjadi tujuan wisata yang mampu memberi stimulant kenaikan devisa dan sekalipun sebagai andalan pendapatan negara selain minyak bumi. Selain itu, juga ada daerah yang memiliki potensi sebagai sentra industry, sekaligus sebagai *hub of the financial district* atau menjadi pusat arus perdagangan.

Selanjutnya masing-masing daerah perlu diberi kesempatan menumbuhkembangkan kepentingan dan cita-citanya sendiri. Walaupun ada kepentingan nasional di suatu daerah, misalnya sebagai andalan utama pengembangan pariwisata, daerah harus diberi peluang untuk mencenangkan tujuan dan sasaran pembangunannya sendiri. Suatu daerah misalnya, dapat saja mencanangkan cita-cita untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi tertentu dalam tata ekonomi nasional melalui program- program Pembangunan intensifikasi dan diversifikasi pertanian atau agribisnis. Atau dapat juga mencita-citakan untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang Tangguh melalui industrialisasi.¹⁵

F) Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Berikut indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pemberdayaan menurut Lesnussa diantaranya terdiri dari:¹⁶

¹⁵ Sunyoto Usman, “Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”, (Ctk:VII, April 2020). Celeban Timur:Yogyakarta, hlm, 12-13.

¹⁶ ¹³J. U. Lesnussa, “Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong Baguala Ambon”, *Jurnal Sosio Sains*, Vol. 5, No. 2, hlm. 108–114.

Bertambahnya pendapatan, sehingga mampu memenuhi baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sosial dasarnya, adanya perubahan individu ditandai dengan usaha yang lebih produktif dan semakin berkembang memiliki pendapatan yang tetap, memiliki tujuan hidup atau manajemen diri yang terarah, interaksi yang semakin luas antara kelompok dan dilingkungan masyarakat.

Berikut indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pemberdayaan menurut Lesnussa diantaranya terdiri dari:¹⁷

Bertambahnya pendapatan, sehingga mampu memenuhi baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sosial dasarnya, adanya perubahan individu ditandai dengan usaha yang lebih produktif dan semakin berkembang memiliki pendapatan yang tetap, memiliki tujuan hidup atau manajemen diri yang terarah, interaksi yang semakin luas antara kelompok dan dilingkungan masyarakat.

g) Pemberdayaan Ekonomi Menurut Pandangan Islam

Pemberdayaan ekonomi dalam Islam (*taqwiyah al-iqtishadiyyah*), mengacu pada upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi umat Islam agar mencapai kemandirian dan kesejahteraan hidup yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁸

¹⁷ J. U. Lesnussa, "Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong Baguala Ambon", *Jurnal Sosio Sains*, Vol. 5, No. 2, hlm. 108–114.

¹⁸ Rusydiana, Aam Slamet. "Krisis Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam Pemberdayaan Ekonomi Umat dari Perspektif Islam." *Harmoni* 12.2 (2013): hlm. 21-30.

a. Tujuan utama pemberdayaan ekonomi dalam Islam adalah:

Membangun ekonomi umat yang kuat dan tangguh. Ekonomi Islam harus mampu menjadi pilar utama dalam membangun peradaban Islam yang maju dan sejahtera. Menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi. Islam menentang sistem ekonomi yang timpang dan menindas. Pemberdayaan ekonomi harus diupayakan untuk mendistribusikan kekayaan secara merata dan adil kepada seluruh umat Islam. Membebaskan umat Islam dari jeratan kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu masalah utama yang dihadapi umat Islam. Pemberdayaan ekonomi harus mampu mengangkat masyarakat Islam dari jurang kemiskinan dan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.¹⁹

b. Prinsip-prinsip dasar pemberdayaan ekonomi dalam Islam

- a) Ketauhidan (*Tauhid*). Pemberdayaan ekonomi harus dilakukan dengan berlandaskan ketauhidan kepada Allah SWT. Semua usaha dan kerja keras harus dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT.
- b) Keadilan (*Adl*). Pemberdayaan ekonomi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan.

¹⁹ Kasdi, Abdurrohman. "Filantropi Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat (Model pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 9.2 (2016): hlm. 227-245.

- c) Persaudaraan (*Ukhuwah*). Pemberdayaan ekonomi harus dilakukan dengan semangat persaudaraan dan saling membantu. Umat Islam harus saling bahu-membahu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.
 - d) Kebebasan (*Hurriyah*). Pemberdayaan ekonomi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan. Setiap individu berhak untuk memilih usaha dan pekerjaan yang sesuai dengan minatnya dan kemampuannya.
 - e) Tanggung jawab (*Mas'uliyah*). Pemberdayaan ekonomi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Setiap individu bertanggung jawab atas hasil dari usahanya dan harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah SWT.
- c. Strategi pemberdayaan ekonomi dalam Islam
- 1) Pengembangan sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas adalah kunci utama dalam pemberdayaan ekonomi. Umat Islam harus dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi persaingan global.
 - 2) Pemberdayaan modal. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan ekonomi. Umat Islam harus didorong untuk menabung dan berinvestasi agar dapat meningkatkan modal usahanya.
 - 3) Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian nasional. Umat Islam harus didorong untuk mengembangkan usaha UMKM agar dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan.

- 4) Pemberdayaan perempuan. Perempuan memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam perekonomian. Umat Islam harus didorong untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkarya dan berwirausaha.
- 5) Sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Umat Islam harus didorong untuk menggunakan produk dan jasa keuangan syariah.²⁰

2. Pedagang Kaki Lima

1) Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah merupakan para pengusaha yang berjualan disektor informal yang menempati trotoar atau bahu jalan. Biasanya mereka berjualan kebutuhan sehari-hari, seperti makan, mainan anak-anak, atau ada juga menyedikana jasa.²¹ Pedagang kaki lima adalah merupakan para pengusaha yang berjualan disektor informal yang menempati trotoar atau bahu jalan. Biasanya mereka berjualan kebutuhan sehari-hari, seperti makan, mainan anak-anak, atau ada juga menyidikan

²⁰ Utama, Rony Edward. "Strategi pembiayaan pesantren melalui pemberdayaan ekonomi umat." *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam* 5.2 (2020): 117-134.

²¹ Hani Ruchendi, "Penanganan Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Subang", *Jurnal Omnicom Unsub*, Vol. 5 , No. 2, November 2019, hlm. 18.

jasa.

Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.²²

Penyebab munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pelaku usaha yang menggunakan fasilitas prasarana kota bersifat tidak menetap yaitu ketidakmampuan sektor formal dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang terus meningkat yang lebih disebabkan karena banyaknya peningkatan lulusan yang berpendidikan sehingga membutuhkan lowongan pekerjaan yang lebih banyak.

Para pedagang Kaki Lima sering memberikan dampak yang tidak baik yang disebabkan karena pelaksanaan kegiatan bertransaksi para PKL tersebut lebih banyak menggunakan fasilitas umum yang pada akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan sempitnya kesempatan pada lapangan pekerjaan yang ada.²³

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan

²² Ana Fatma Fitriana Wibowo, "Pendapatan Pedagang Kaki Lima dan Faktor yang Mempengaruhi, *Journal of Economic, Business, and Engineering (JEBE)*, Vol. 2, No. 2, April 2021, hlm, 207.

²³ Dadang Supriatna, "Penata Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satpol PP dalam Upaya Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lalu Lintas dan Pejalan Kaki pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari", *Jurnal Tatapamong*, Vol. 3 No. 1, Maret 2021, hlm. 3.

Pedagang Kaki Lima adalah para pedagang yang menjajakan dagangannya di trotoar jalan dengan menjajakan beraneka macam barang maupun kebutuhan sehari-hari.

2) Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal, yaitu operator usaha kecil yang menjual makanan, barang, dan atau jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini sering disebut dengan sektor informal perkotaan. Karakteristik pedagang kaki lima:²⁴

- a) Pada umumnya tingkat pendidikannya rendah.
- b) Memiliki sifat spesialis dalam kelompok barang/jasa yang diperdagangkan.
- c) Barang yang diperdagangkan berasal dari produsen kecil atau hasil produksi sendiri.
- d) Pada umumnya modal usahanya kecil, berpendapatan rendah, erta kurang mampu memupuk dan mengembangkan modal.
- e) Hubungan pedagang kaki lima dengan pembeli bersifat komersial.

Di sisi lain dikatakan beberapa cirri-ciri PKI. yang menyambung pernyataan di atas yaitu:

- a) Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan;
- b) Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan

²⁴ David Cardona, *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 33-34.

yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya dikategorikan “liar”).

- c) Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung harian;
- d) Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu;
- e) Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan dengan usaha- usaha lain.
- f) Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- g) Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja.

3) Kekuatan dan Kelemahan Pedagang Kaki Lima

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Harga terjangkau produk yang di jual para pedahang kaki lima ini juga dapa di jangkau oleh semua kalangan.
- 2) Lokasi dekat jalan raya yang sangat strategis dan pelayanan yang di lakukan cukup baik untuk membuat konsumen merasa nyaman.
- 3) Ketersediaan Bahan Baku, dagangan yang di jual oleh pedagang kaki lima barang menta dan setenga jadi makanan yang tidak di proses dan di peoses dagangan yang di jual seperti minuman dan makanan.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

- 1) Tidak ada promosi untuk penlanggan, sistem promosi tidak di

lakukan dengan memanfaatkan teknologi maupun dengan cara yang lain.

- 2) Peralatan Yang Digunakan Masih Sederhana, seperti yang kita ketahui bahwa pedagang kaki lima pada umumnya masih menggunakan peralatan yang sederhana yang dengan sesuai jenis dagangan yang di jual.
- 3) Kemasan Masih Sederhana, kemasan di angap sangat penting dalam strategi pemasaran, kemasan juga memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah produk.²⁵

4) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima

Pendapatan pedagang kaki lima bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut beberapa faktor utama yang sering memengaruhi:

- a) **Modal Usaha:** Menurut Amirullah, dkk Modal dalam pengertian dapat disimpulkan sebagai uang yang digunakan dalam melangsungkan kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam sebuah bisnis membeli faktor-faktor produksi seperti bahan baku dan bangunan usaha tentunya diperlukan uang.²⁶
- b) **Jam Kerja:** Menurut Rifqi Khoirunnisa (2017) waktu yang digunakan oleh seseorang untuk membuat produk atau jasa tertentu

²⁵ Rahman Dano Mustafa' Dkk, Strategi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Dalam Mempertahankan Usahanya Di Lapak Mangga Dua Kota Ternate, *Jurnal Manajemen & Bisnis* , Vol. 7, No. 2, Hal 103-114, hlm, 111.

²⁶ Amirullah, Dkk, Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Pasar Sunday Morning (Sunmor) Purwokerto. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 21(2). <https://doi.org/10.32424/jeba.v21i2.1328>, (2019), hlm, 19.

disebut dengan jam kerja. Jam kerja 23 merupakan waktu untuk melaksanakan pekerjaan dan dapat dilakukan siang hari atau malam hari

c) **Lama Usaha:** Lama usaha adalah lamanya seorang menekuni usaha yang dijalankan. Lama usaha dapat juga diartikan sebagai lamanya waktu yang sedang dijalani pedagang dalam menjalankan usaha.

d) **Lokasi Usaha:** Menjalankan kegiatan usaha jelas memerlukan tempat usaha yang dikenal dengan lokasi usaha. Lokasi usaha ini penting baik sebagai tempat menjalankan aktivitas yang melayani konsumen, aktivitas penyimpanan, atau untuk mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya. Konsumen dapat melihat langsung barang yang diproduksi atau yang di jual baik jenis, jumlah, maupun harganya. Dengan demikian, konsumen dapat lebih mudah memilih dan bertransaksi atau melakukan pembelian.

2. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti melampirkan peneliti terdahulu yaitu sebagai berikut:

Tabel II Penelitian Terdahulu

	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nia Novita Putri, (Skripsi, Universitas Negeri Medan, 2023).	Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan	Bahwa besar pendapatan pedagang kaki lima khususnya pedagang sayur di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan berkisar 2-3 juta/bulan dalam rentan waktu 1 tahun.
2.	Wahyu Pramono, (Jurnal Administrasi dan Pemerintahan, STISIP Imam Bonjol : Vol. 1, No. 2 (November) 2023)	Dilema Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang dan Payakumbuh	Implementasi kebijakan lebih menitikberatkan pada penataan dari pada pemberdayaan PKL, sehingga kegiatan penataan dalam bentuk penertiban, pengurangan luas lokasi PKL, zonasi PKL kurang mendapat respon yang baik dari PKL dan merasa tidak mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.
3.	Sheila Lucky Octaviani, Ardiana Yuli Puspitasari, (Jurnal Kajian Ruang Vol 1 No 1 Maret 2021).	Studi Literatur: Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima	Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) memiliki dampak positif maupun negatif bagi perkotaan. Selain meningkatkan perekonomian perkotaan, pedagang kaki lima juga menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan seperti terganggunya keindahan kota, keamanan, kebersihan, kesemrawutan, dan kemacetan lalu lintas
4.	Alfiyah, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1441 / 2020).	Peranan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Baru Dalam Pembinaan PKL	Upaya pemerintah dengan di bangunya pasar teratai hiegenis untuk PKL yang ada di kecamatan senapelan maka dinas perdagangan dan perindustrian sudah melakukan tugas dan

			fungsinya dengan semestinya.
5.	Ahmad Sururi, (Jurnal Wacana Kinerja Volume, 22 Nomor 2 November 2019).	Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Strategi Inovasinya di Kawasan Pasar Royal Kota Serang	Kinerja implementasi kebijakan pemberdayaan dan penataan PKL di Kawasan Pasar Royal Kota Serang masih belum optimal dilaksanakan.
6.	Eko Susanto, (Skripsi, IAIN Metro, 2019)	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro (Studi Kasus di Pasar Cendrawasih Kota Metro)	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pemerintahan Kota Metro sudah melakukan pemberdayaan namun belum maksimal. Pemkot harus terus berinovasi dalam memperdayakan PKL Kota Metro. Pemberdayaan pedagang Kaki Lima di Pasar Cendrawasih kota Metro, antara lain: Pemkot secara perlaHan sudah bekerjasama dengan koperasi untuk meningkatkan akses pasar untuk membantu peningkatan akses permodalan, setiap event Pemkot sudah bekerjasama kepada PKL untuk memasarkan produk Kota Metro khususnya bidang kuliner, setiap bulan ramadhan PKL diperbolehkan berjualan di sekitar Lapangan sumber. Pemberdayaan PKL sesuai tuntutan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL.

7.	Rohaetin, (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol.3	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Palangkaraya	Hasil penelitian adalah mereka berdagang pada malam hari sampai tengah malam. Pada bulan puasa mereka berdagang sampai
----	---	---	--

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan maka bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengetahui peran pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki lima. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada kajiannya yang lebih difokuskan untuk mengetahui peran Koordinator dalam penataan Pedagang Kaki lima di Kota Padangsidimpuan. Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya akan mempengaruhi pada hasil penelitian yang diperolehnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di area Kota Padangsidempuan yang beralamat di Jalan Patrice Lumumba, Jalan Mongonsidi dan Jalan Thamrin Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara 22711. Adapun waktu dari penelitian dilakukan mulai dari bulan Oktober 2023 hingga Februari 2024.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode dalam peneliti status kelompok, manusia, dan kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁷ Berdasarkan metodenya, penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif pada penelitian.²⁸

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan dan masalah yang sebenarnya. Untuk memperoleh informasi dan data maka dibutuhkan subjek penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek penelitian

²⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung, Pustaka Setia, 2014), hlm. 31.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hlm. 7.

ini adalah Pedagang Kaki Lima untuk mendeskripsikan masalah peneliti mengenai bagaimana Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidimpuan jalan Thamrin, jalan Patrice Lumumba dan Mongonsidi.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung.²⁹ Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari lokasi penelitian, diperoleh melalui wawancara kepada para pedagang kaki lima yang ada di jalan Thamrin, jalan Patrice Lumumba dan jalan Mongonsidi dengan menggunakan pedoman wawancara yang dipersiapkan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Selain data primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitin yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.³⁰ Adapun yang menjadi sumber penunjang bagi penelitin ini adalah data yang diperoleh dari sumber yang berada di luar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang akan

²⁹ Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta, hlm, 136.

³⁰ Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2013), hlm. 143.

diteliti, baik berupa tulisan seperti, buku-buku, makalah, hasil penelitian, artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data dilokasi penelitian, menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah upaya pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi yang berkaitan dengan subjek penelitian ini.³¹ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipan, karena peneliti tidak ikut berperan serta dalam kehidupan orang yang observasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat mengenai pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan. Teknik non partisipan digunakan sebagai pendekatan oleh peneliti untuk memperoleh dan menggali data secara nyata dan mendalam tentang permasalahan yang ada di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap perasaan, pengalaman, emosi motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.³²

³¹ Afrial, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.21

³² Marwadani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta:Deepublish, 2020), hlm. 50.

Dalam penelitian ini model wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh peneliti dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi. Wawancara terstruktur bersifat lebih sistematis karena pertanyaan sudah disiapkan sebelumnya sehingga pola komunikasi yang terjalin lebih sistematis dan homogen. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan kepada para pedagang kaki lima yang ada di Jl, Thamrin, Jl, Mogonsindi, dan Jl, Patrice Lumumba Kota Padangsidempuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.³³ Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan dan pribadi responden, yang dilakukan seorang psikologi dalam meneliti perkembangan seseorang melalui catatan pribadinya. Dokumentasi dalam penelitian bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian tersebut terjadi di lapangan dengan mendokumentasikan berbagai data pendukung sebagai penguat bahwa penelitian benar-benar dilaksanakan di lapangan.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

³³ Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 26.

Pelaksanaan tehnik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat dan kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.³⁴ Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembimbing terhadap data itu, adapun pengecekan data yang digunakan adalah:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan penelitian sangat menentukan dalam pengumpulan data, keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan. Perpanjangan keikutsertaan adalah untuk memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, data juga untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan dari peneliti sendiri.³⁵

2. Ketekunan Pengamatan

Ketentuan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memutuskan daripada hal-hal tersebut secara rinci. Untuk keperluan itu teknik ini menuntut agar peneliti mampu menguraikan secara tentatif dan penelaahan secara rinci dapat dilakukan.

³⁴ Moleong, Lexy J.. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm, 173

³⁵ Fazar Nur'aini Dwi Fatimah, *Teknik Analisis Swot*, Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2016, hlm. 170-175.

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.³⁶

3. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.³⁷

4. Mengadakan *Memberchek*

Memberchek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *memberchek* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan pemberi data.³⁸

5. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai

³⁶ M. Syahrani Jailani, Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal PEJ*, 4 (2), Desember 2020, hlm, 19 – 23

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif R&D*, hlm 275.

³⁸ Djam'an Satori, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Desember 2017, hal 105

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau *kontradiksi*. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Triangulasi bisa dikategorikan bagaikan metode pengecekan keabsahan informasi yang menggunakan suatu yang lain. Diluar informasi itu buat keperluan pengecekan ataupun bagaikan pembanding terhadap informasi itu.³⁹

Berikut jenis Triangulasi yang bisa kita gunakan :

a) Triangulasi Metode

Triangulasi metode melibatkan penggunaan beberapa metode atau pendekatan yang berbeda dalam pengumpulan atau analisis data. Misalnya, dalam sebuah penelitian tentang pemberdayaan pedagang kaki lima, seorang peneliti dapat menggunakan wawancara, survei, dan pengamatan lapangan untuk mengumpulkan data. Dengan membandingkan hasil dari ketiga metode ini, peneliti dapat memvalidasi temuan atau mendapatkan

³⁹ Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, hlm, 78.

pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang diteliti.⁴⁰

b) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama.⁴¹

c) Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti melibatkan penggunaan beberapa peneliti atau pengamat independen untuk memeriksa data atau interpretasi temuan. Dalam penelitian kualitatif, misalnya, seorang peneliti dapat meminta rekan sejawat atau pakar di bidang yang sama untuk meninjau temuannya dan memberikan umpan balik. Dengan melibatkan perspektif yang berbeda, peneliti dapat mengurangi bias individual dan meningkatkan validitas temuannya.⁴²

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

⁴⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm, 218

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm,36

⁴²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019),hlm, 91.

Analisis data dalam penelitian merupakan pekerjaan yang amat kritis dalam proses penelitian, penelitian harus secara cermat menentukan pola analisis statistik ataupun non statistik.⁴³ Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelola hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat landasan penelitian teoritis, maka Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Padangsidimpuan.

Tujuan analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan nya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikan nya bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.⁴⁴ Aktivitas dalam analisis data yaitu:

- a. Reduksi data (*data reduction*), yaitu pengolahan data mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data yang mencakup kegiatan mengiktiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilihnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.
- b. Penyajian data (*Display data*), Hasil reduksi data diorganisasikan sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh.

⁴³ Pujani Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 209.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 103.

c. *Conclution drawing and verification*, pembuatan tabel atau diagram berbentuk sketsa, sinopsis, matriks atau bentuk-bentuk lain ataupun jenis reduksi data yang telah diorganisasikan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan.⁴⁵

¹⁹Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 7–8

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kota Padangsidimpuan

Kota Padangsidimpuan terletak 432 km dari kota Medan ibukota Provinsi Sumatera Utara, dengan wilayah yang dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan. Posisi Kota Padangsidimpuan memiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama yang merupakan penghubung antara berbagai pusat pertumbuhan di wilayah Sumatera. Wilayah Kota Padangsidimpuan berada di tengah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Terdapat 6 kecamatan di Kota Padangsidimpuan, yaitu Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, dan Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.

Kecamatan Padangsidimpuan utara adalah salah satu kecamatan dari enam kecamatan di kota padangsidimpuan dan berjarak 0,2 km dari ibu kota Padangsidimpuan. secara administratif Kecamatan Padangsidimpuan utara berbatasan dengan kecamatan padangsidimpuan hutaimbaru di sebelah Utara, kecamatan padangsidimpuan selatan disebelah selatan, kabupaten tapanuli selatan disebelah barat dan kecamatan padangsidimpuan batunadua di sebelah timur. Letak astronomi.

kecamatan padangsidimpun utara berada pada 0121'30''- 0121'20'' lintang utara dan 99 14'30''- 99 16'10'' bujur timur.⁴⁶

2. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidimpun

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian penting dari sektor informal yang memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian lokal, khususnya di Kota Padangsidimpun. Keberadaan PKL tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan keterbatasan modal dan akses ke sektor formal, tetapi juga turut memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. Namun, meskipun memiliki peranan ekonomi yang signifikan, PKL kerap kali menghadapi berbagai persoalan struktural dan sosial yang menghambat perkembangan usaha mereka.

Kecamatan Padangsidimpun Utara merupakan salah satu wilayah strategis di Kota Padangsidimpun yang memiliki aktivitas ekonomi cukup tinggi. Wilayah ini menjadi salah satu pusat konsentrasi perdagangan, termasuk aktivitas sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL di Kota Padangsidimpun tersebar di sejumlah titik keramaian seperti pasar tradisional, terminal, pertokoan, dan ruas-ruas jalan utama.

⁴⁶ Alfian Yusri, *Statistik Daerah Kecamatan Paangsidimpun Utar a*, (Jakarta: Badan Pusat Sttistik Kota Padangsidimpun, 2022), hLM.4

PKL di kawasan ini umumnya menjalankan usaha kecil-kecilan seperti penjualan makanan dan minuman, pakaian, aksesoris, barang kebutuhan harian, serta jasa (seperti tambal ban dan potong rambut). Mayoritas pelaku usaha ini berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan harian.

Secara umum, karakteristik PKL di Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

- a. Skala usaha kecil dan tidak formal, Usaha yang dijalankan umumnya tidak memiliki izin usaha resmi dan tidak tercatat dalam sistem administrasi pemerintah.
- b. Mobilitas tinggi, Banyak PKL yang menggunakan gerobak atau tenda portabel, sehingga mudah berpindah lokasi.
- c. Pendapatan tidak tetap, Karena bergantung pada cuaca, jumlah pembeli, dan kondisi pasar, penghasilan harian sangat fluktuatif.
- d. Rendahnya akses terhadap permodalan dan pelatihan – Sebagian besar PKL tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal atau pelatihan manajemen usaha.
- e. Masalah lokasi usaha – Banyak PKL berjualan di tempat yang tidak sesuai dengan peruntukan tata kota, sehingga sering menghadapi penertiban oleh Satpol PP.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan.

a. Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan

Bisnis merupakan suatu kesibukan yang dilakukan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen maupun bisnis lainnya. bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana menjual barang ataupun jasa agar mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ada di dalam insdustri. ebagian besar pedagang kaki lima memilih berjualan karena dorongan ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan formal, serta keinginan untuk mandiri secara finansial.

Berdagang sebagai pilihan yang realistis, terutama karena tidak memerlukan modal besar serta memungkinkan mereka untuk mengatur waktu kerja sendiri. Selain itu, faktor lingkungan sosial dan pengalaman pribadi juga turut memengaruhi keputusan pedagang dalam memilih berdagang sebagai mata pencaharian utama.

Wawancara dengan bu Indah Sari Harahap salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan sayuran mengatakan bahwa: “Saya berjualan di sini untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena susahnya mencari pekerjaan sekarang apalagi seorang ibu rumah tangga seperti saya akan susah sekali mencari pekerjaan di bidang lain sehingga saya

memutuskan untuk bekerja sebagai pedagang kaki lima.”⁴⁷

Wawancara dengan bu Erlina Siregar yang juga salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan sayuran mengatakan bahwa: “Alasan saya berjualan tentunya untuk mendapatkan penghasilan dan berjualan ini sudah menjadi mata pencarian utama saya karna saya tidak memiliki penghasilan lainnya lagi kecuali dari hasil berjualan di sini.”⁴⁸

Begitu juga dengan ibu Nema Hasibuan yang juga salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan sayuran mengatakan bahwa: “Saya memilih berjualan tentunya untuk mencari nafkah dan alasan saya berjualan di sini karena sangat ramai pembeli sehingga barang dagangan saya banyak pembeli dan tentunya itu sangat menguntungkan bagi saya karena ini adalah mata pencarian utama saya juga.”⁴⁹

Begitu juga dengan ibu Hanipa yang juga salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan sayuran mengatakan bahwa: “Saya sudah tahunan berjualan di sini dan alasan saya berjualan disini karena memang untuk mencari nafkah utama karna dengan berdagang berdagang uang cepat berputar dengan waktu yang cepat karena milik kita sendiri walaupun kecil-kecil-an.”⁵⁰

Begitu juga dengan bapak Johannes yang juga salah satu pedagang

⁴⁷ Indah Sari Harahap, *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pukul 11:45 WIB, 12 April, 2025.

⁴⁸ Erlina Siregar, *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pukul 12:10 WIB, 12 April, 2025.

⁴⁹ Nema Hasibuan *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pukul 12:45 WIB, 12 April, 2025

⁵⁰ Hanipa *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pukul 13:00 WIB, 12 April, 2025

kaki lima yang aktif berjualan sayuran mengatakan bahwa: “Saya memilih berjualan sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Alasan saya berjualan di lokasi ini karena ramai pembeli, sehingga dagangan saya cepat habis dan penghasilan bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu, berjualan di sini tidak membutuhkan modal besar dan waktu kerja yang fleksibel, sehingga sangat membantu perekonomian saya.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima pedagang kaki lima yang aktif berjualan sayuran, yaitu Ibu Indah Sari Harahap, Ibu Erlina Siregar, Ibu Nema Hasibuan, Ibu Hanipa, dan Bapak Johannes, diperoleh gambaran umum mengenai alasan berjualan, keuntungan, serta hambatan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha tersebut.

a) Keuntungan Berjualan Sayuran

Keuntungan utama yang dirasakan oleh para pedagang adalah bahwa kegiatan berdagang menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Sebagian besar pedagang memilih berjualan karena keterbatasan lapangan pekerjaan, terutama bagi ibu rumah tangga, sehingga berdagang kaki lima menjadi alternatif yang paling memungkinkan.

Selain itu, lokasi berjualan yang ramai pembeli memberikan keuntungan tersendiri karena dagangan cepat terjual dan perputaran uang berlangsung relatif cepat. Modal yang dibutuhkan

⁵¹ Johannes *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pukul 13:20 WIB, 12 April, 2025

juga tidak terlalu besar, serta usaha ini dapat dikelola secara mandiri, sehingga para pedagang memiliki kebebasan waktu kerja dan tidak bergantung pada pihak lain. Hal ini menjadikan usaha berdagang sayuran kaki lima tetap bertahan meskipun hasil yang diperoleh terkadang tidak terlalu besar.

b) Hambatan Berjualan Sayuran

Di sisi lain, para pedagang juga menghadapi beberapa hambatan dalam menjalankan usahanya. Hambatan utama adalah ketidakstabilan pendapatan, karena penghasilan sangat bergantung pada jumlah pembeli setiap harinya. Selain itu, pedagang sering menghadapi persaingan antar sesama pedagang, serta kondisi cuaca yang tidak menentu yang dapat memengaruhi jumlah pembeli dan kualitas dagangan.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan modal usaha, yang membuat pedagang sulit untuk menambah variasi dan jumlah dagangan. Tidak adanya penghasilan tetap dan jaminan usaha juga menjadi tantangan tersendiri bagi pedagang kaki lima dalam menjaga keberlangsungan usahanya.

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa banyak pedagang memilih berjualan adalah karena, kebutuhan ekonomi yang mendesak, minimnya peluang kerja formal, dan dukungan dari lingkungan sosial. Selain itu, mereka merasa lebih mandiri dengan membuka usaha sendiri walaupun dalam skala kecil. Sebagian besar

pedagang mengaku sulit mendapatkan pekerjaan di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan khusus, atau tidak lolos seleksi kerja. Kondisi ini mendorong mereka untuk membuka usaha sendiri sebagai alternatif penghasilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ibu rumah tangga yang menjadi pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan, diketahui bahwa kegiatan berjualan memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, baik dari segi ekonomi maupun pengelolaan waktu.

Wawancara dengan bu Siska Siregar yang juga salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan pakaian mengatakan bahwa: “Sejak saya mulai jualan, alhamdulillah bisa bantu suami dari segi penghasilan. Dulu cuma mengandalkan gaji suami yang pas-pasan. Sekarang bisa beli kebutuhan dapur, bahkan kadang bisa ditabung sedikit-sedikit.”⁵²

Wawancara lain yang dilakukan peneliti dengan bu Mardiah salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan pakaian mengatakan bahwa: “Memang jadi lebih sibuk, karena pagi-pagi harus siapkan dagangan dulu, tapi saya tetap sempat masak dan urus anak. Justru anak-anak jadi lebih mandiri sekarang karena saya ajari bantu-bantu juga.”⁵³

⁵² Siska Siregar, *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pukul 14:00 WIB, 12 April, 2025.

⁵³ Mardiah, *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pukul 15:20 WIB, 12 April, 2025.

Wawancara dengan bu Elsa yang juga salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan pakaian mengatakan bahwa: “Saya mulai berjualan pakaian karena ingin membantu perekonomian keluarga. Penghasilan dari berjualan ini memang tidak menentu, tetapi cukup untuk menambah uang belanja dan kebutuhan anak-anak. Selain itu, saya bisa mengatur waktu sendiri antara berdagang dan mengurus rumah tangga.”⁵⁴

Wawancara dengan bu Fitri yang juga salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan pakaian mengatakan bahwa: “Awalnya saya ragu untuk berjualan, tetapi setelah dijalani ternyata banyak manfaatnya. Selain bisa menambah penghasilan keluarga, saya juga bisa bersosialisasi dengan pembeli dan pedagang lain. Tantangannya adalah harus pandai mengatur waktu dan tenaga agar tetap bisa mengurus rumah dan berdagang dengan baik.”⁵⁵

Wawancara dengan bu Umami yang juga salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan pakaian mengatakan bahwa: “Dengan berjualan pakaian, saya merasa lebih mandiri secara ekonomi. Walaupun capek karena harus melayani pembeli seharian, hasilnya cukup membantu keuangan keluarga. Saya juga bisa tetap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga tanpa harus meninggalkan anak-

⁵⁴ Elsa, *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pukul 15:40 WIB, 12 April, 2025.

⁵⁵ Fitri, *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pukul 16:00 WIB, 12 April, 2025.

anak.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima pedagang kaki lima penjual pakaian, yaitu Ibu Siska Siregar, Ibu Mardiah, Ibu Elsa, Ibu Fitri, dan Ibu Ummi, diperoleh gambaran mengenai peran kegiatan berdagang terhadap perekonomian keluarga serta tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha tersebut.

a) Keuntungan Berjualan Pakaian

Keuntungan utama yang dirasakan oleh kelima pedagang adalah bertambahnya pendapatan keluarga, sehingga dapat membantu penghasilan suami dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, seperti kebutuhan dapur dan kebutuhan anak-anak. Beberapa pedagang juga menyatakan bahwa dari hasil berjualan, mereka masih dapat menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung, meskipun jumlahnya terbatas.

Selain itu, berdagang pakaian memberikan fleksibilitas waktu kerja, sehingga para pedagang tetap dapat menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, seperti mengurus anak dan pekerjaan rumah. Kegiatan berdagang juga mendorong kemandirian ekonomi perempuan serta meningkatkan kemampuan bersosialisasi dengan pembeli maupun sesama pedagang. Bahkan, dalam beberapa kasus, usaha ini turut membentuk sikap kemandirian anak karena dilibatkan

⁵⁶ Ummi, *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pukul 16:20 WIB, 12 April, 2025.

dalam membantu kegiatan usaha secara sederhana.

b) Hambatan Berjualan Pakaian

Di sisi lain, para pedagang juga menghadapi sejumlah hambatan dalam menjalankan usahanya. Hambatan yang paling sering dirasakan adalah pendapatan yang tidak menentu, karena sangat bergantung pada jumlah pembeli setiap harinya. Selain itu, aktivitas berdagang membuat pedagang menjadi lebih sibuk dan cepat lelah, terutama karena harus membagi waktu antara berdagang dan mengurus rumah tangga.

Hambatan lainnya adalah pengelolaan waktu dan tenaga yang cukup menantang, sehingga pedagang harus pandai mengatur keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Persaingan antar pedagang serta kondisi penjualan yang tidak selalu ramai juga menjadi faktor yang memengaruhi kestabilan usaha mereka.

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa kegiatan berjualan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Meski menambah beban pekerjaan, banyak ibu rumah tangga yang merasa lebih berdaya karena dapat membantu keuangan keluarga. Bahkan, sebagian dari pedagang mengembangkan usaha kecil lain di rumah seperti membuat kue atau membuka warung kecil, sebagai bentuk lanjutan dari aktivitas berdagang.

Secara keseluruhan, kegiatan berjualan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghasilan tambahan, tetapi juga memperkuat peran

ibu dalam mendukung kestabilan ekonomi rumah tangga serta meningkatkan kemandirian dalam mengelola usaha mikro secara mandiri.

Untuk mendapatkan pendapatan yang lebih pedagang menjual berbagai dagangan yang bervariasi untuk memikat para pembeli diketahui bahwa pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan menjual beragam jenis barang dagangan, yang umumnya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di sekitar lokasi berjualan dan kemampuan modal yang dimiliki. Serta sebagian besar pedagang kaki lima memulai usaha mereka dengan modal yang relatif kecil. Modal awal ini umumnya berasal dari tabungan pribadi, pinjaman keluarga, atau hasil menyisihkan uang belanja rumah tangga.

Wawancara dengan bu imah Siregar yang juga salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan buah mengatakan bahwa: “Saya menjual buah dikarenakan buah adalah salah satu kebutuhan dari 4 sehat 5 sempurna, modalnya juga cepat diputar kembali oleh karena itu saya menjual produk tersebut.”⁵⁷

Wawancara dengan pak Ardi Harahap yang juga salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan buah mengatakan bahwa: “Dengan modal yang sedikit dan pas-pasan saya hanya bisa menjual buah yang murah dan sedikit saja seperti rambutan dan papaya namun

⁵⁷ Imah Siregar, *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pukul 14:15 WIB, 12 April, 2025.

itu juga sangat diminati pembeli.”⁵⁸

Wawancara dengan pak Wadi Adi, yang juga salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan buah mengatakan bahwa: “Modal awal saya sekitar Rp500.000. Itu saya pakai beli kardus, memasang meja, dan plastik buah.”⁵⁹

Wawancara dengan bu Indah Sari Harahap, yang juga salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan buah mengatakan bahwa: “Saya menjual berbagai jenis buah seperti apel, manga, pir dan lainnya dan modal awal saya sangat sedikit sekitaran lima juta dan saya memilih berjualan di sini karena saya tidak mampu untuk menyewa ruko dan dengan berjualan di sini modal awal saya sedikit lebih murah.”⁶⁰

Wawancara dengan bu Siska Siregar, yang juga salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan buah mengatakan bahwa: “Saya jual buah-buahan. Kebanyakan ibu-ibu yang habis belanja di pasar mampir beli karena harga saya bisa lebih murah sedikit dari di dalam pasar itu yang membuat saya betah berjualan di sini karena ramai yang membeli barang dagangan saya.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima pedagang kaki lima

⁵⁸ Ardi Harahap, *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pukul 14:45 WIB, 12 April, 2025

⁵⁹ Wadi Adi, *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pukul 15:00 WIB, 12 April, 2025.

⁶⁰ Indah Sari Harahap, *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pukul 11:45 WIB, 12 April, 2025.

⁶¹ Siska Siregar, *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pukul 14:00 WIB, 12 April, 2025.

yang berjualan buah, yaitu Ibu Imah Siregar, Bapak Ardi Harahap, Bapak Wadi Adi, Ibu Indah Sari Harahap, dan Ibu Siska Siregar, diperoleh gambaran mengenai alasan memilih usaha penjualan buah, keuntungan yang diperoleh, serta hambatan yang dihadapi dalam menjalankan usaha tersebut.

a) Keuntungan Berdagang Buah

Keuntungan utama yang dirasakan oleh para pedagang adalah bahwa buah merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selalu dicari karena berkaitan dengan pola hidup sehat. Hal ini membuat permintaan terhadap buah relatif stabil dan dagangan mudah terjual. Selain itu, usaha penjualan buah memiliki perputaran modal yang cukup cepat, sehingga pedagang dapat segera menggunakan kembali hasil penjualan untuk membeli stok baru.

Sebagian pedagang menyatakan bahwa usaha ini dapat dijalankan dengan modal awal yang relatif kecil, mulai dari ratusan ribu hingga beberapa juta rupiah, sehingga cocok bagi masyarakat dengan keterbatasan modal. Berjualan sebagai pedagang kaki lima juga dianggap lebih menguntungkan karena tidak memerlukan biaya sewa tempat seperti ruko, serta harga jual dapat dibuat lebih murah sehingga menarik minat pembeli. Lokasi yang strategis dan ramai turut meningkatkan jumlah pembeli dan pendapatan pedagang.

b) Hambatan Berdagang Buah

Di sisi lain, para pedagang juga menghadapi sejumlah hambatan dalam menjalankan usahanya. Hambatan utama adalah keterbatasan modal, yang menyebabkan sebagian pedagang hanya mampu menjual jenis buah tertentu dengan jumlah yang terbatas. Selain itu, buah merupakan barang yang mudah rusak, sehingga pedagang berisiko mengalami kerugian apabila dagangan tidak segera terjual.

Hambatan lainnya meliputi ketergantungan pada kondisi cuaca dan jumlah pembeli, serta persaingan dengan pedagang buah di dalam pasar. Keterbatasan sarana dan fasilitas berjualan juga menjadi tantangan, terutama bagi pedagang yang berjualan di tempat terbuka tanpa perlindungan yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Jenis dagangan yang dijual umumnya meliputi makanan ringan, minuman, sayur-mayur, jajanan tradisional, dan barang kebutuhan harian. Produk-produk tersebut dipilih karena mudah dibuat, cepat laku, dan tidak membutuhkan modal besar. Selain itu, banyak pedagang yang memproduksi dagangannya sendiri di rumah, sehingga bisa menekan biaya dan meningkatkan keuntungan.

Modal awal usaha Pedagang Laki lima di Kota Padangsidimpuan berkisar antara Rp300.000 hingga jutaan. Pedagang Kaki Lima memulai usaha dengan skala kecil dan memanfaatkan peralatan yang sudah ada di rumah, sehingga bisa menekan biaya pengeluaran awal.

Modal yang terbatas tidak menjadi penghalang, justru menjadi dorongan bagi pedagang untuk lebih kreatif dan hemat dalam menjalankan usaha.

b. Kontribusi terhadap Pendapatan Keluarga

Pedagang kaki lima (PKL), dalam menjalankan usaha memiliki peran dalam menopang ekonomi keluarga. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Kota Padangsidempuan, terlihat bahwa pendapatan dari aktivitas berdagang mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap kebutuhan sehari-hari rumah tangga.

Penghasilan yang didapat pedagangpun beragam karena dilihat juga dari jenis dagangan dan ada juga beberapa pedagang yang merasa cukup untuk menutupi kebutuhan sehari namun tidak dapat di pungkiri juga ada beberapa pedagang terkadang rugi jika dagangannya tidak laku atau sepi pembeli seperti hasil wawancara yang di lakukan dengan beberapa pedagang di bawah ini.

Wawancara dengan bu Nema yang salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan ikan mengatakan bahwa: “Penghasilan yang saya dapat dari berjualan buah dan nanas potong adalah sekitaran 200-400rb perhari dan dari penghasilan itu sangat membantu kebutuhan rumah tangga dan sangat-sangat membantu karena penghasilan itu merupakan pengasilan utama saya.”⁶²

⁶² Nema Hasibuan *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pukul 12:45 WIB, 12 April , 2025

Wawancara dengan bu imah yang salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan ikan mengatakan bahwa: “Pengasilan yang saya dapat peharinya lumayan banyak dan sangat membantu untuk keluarga saya namun terkadang adakalanya kurang karena pembeli kadang ramai dan kadang sepi dimana saya memiliki 6 orang anak yang harus saya nafkahi sehingga terkadang tidak seimbang.”⁶³

Wawancara dengan pak Wadi Adi yang salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan ikan mengatakan bahwa:

Pengasilan yang saya dapat dari berdagang cukup untuk menutupi nafkah keluarga saya karena saya dan istri saya berjualan di sini dan ini menjadi pendapatan utama kami untuk keperluan rumah tangga namun ada kalanya sepi dan itu membuat kai harus memutar otak untuk tambahan lainnya.⁶⁴

Dari pernyataan di atas menunjukkan penghasilan dari pedagang kaki lima beragam variasi ada yang cukup untuk keluarganya namun juga ada yang kekurangan karena setiap keluarga memiliki tanggungan yang berbeda. Dalam banyak kasus, penghasilan dari usaha kaki lima bahkan menjadi sumber pendapatan utama keluarga, terutama bila suami tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan suami tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peran sebagai pedagang kaki lima tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga.

⁶³ Imah Siregar, *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pukul 14:15 WIB, 12 April, 2025.

⁶⁴ Wadi Adi, *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pukul 15:00 WIB, 12 April, 2025.

Lebih jauh, aktivitas berdagang juga membuka peluang bagi ibu rumah tangga untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan, membangun jaringan sosial, dan meningkatkan rasa percaya diri sebagai pelaku ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan dan dukungan terhadap pedagang kaki lima sangat penting, karena secara tidak langsung turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas.

Pendapatan yang didapat oleh pedagang berbeda karena terkadang ramai terkadang sepi ada beberapa hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari ada juga cukup untuk memutar modal kembali yaitu untuk membuat dagangan lebih ramai lagi seperti.

Hasil wawancara dengan Ardi Harahap salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan ikan mengatakan bahwa: “Pengasilan saya sangat cukup sekali dan sesuai untuk kebutuhan sehari-hari bahkan lebih dan biasanya itu saya modalkan kembali agar dagangan saya mendatangkan banyak pembeli.”⁶⁵

Wawancara dengan pak Rahmat Doni yang salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan ikan mengatakan bahwa: “Alhamdulillah cukup, Kadang ada lebihnya saya simpan, berjualan disini sangat ramai pembeli oleh karena itu saya tidak pernah pindah dari sini karena ramai pembelii jadi dagangan saya juga jadi selalu habis dan itu membuat

⁶⁵ Ardi Harahap, *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidimpuan*, Wawancara Pukul 14:45 WIB, 12 April , 2025.

kebutuhan rumah tangga saya terpenuhi.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima pedagang kaki lima yang aktif berjualan ikan, yaitu Ibu Nema, Ibu Imah, Bapak Wadi Adi, Bapak Ardi Harahap, dan Bapak Rahmat Doni, diperoleh gambaran mengenai tingkat pendapatan, manfaat ekonomi, serta hambatan yang dihadapi dalam menjalankan usaha penjualan ikan.

a) Keuntungan Berdagang Ikan

Keuntungan utama yang dirasakan oleh para pedagang adalah bahwa usaha berjualan ikan menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Sebagian pedagang memperoleh penghasilan harian yang cukup besar dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, bahkan ada yang memiliki kelebihan pendapatan yang kemudian diputar kembali sebagai modal usaha untuk menambah stok dagangan.

Lokasi berjualan yang ramai pembeli turut memberikan keuntungan karena dagangan relatif cepat habis. Dalam beberapa kasus, usaha ini dijalankan bersama pasangan, sehingga pendapatan menjadi lebih stabil dan mampu menopang kebutuhan keluarga secara menyeluruh. Selain itu, berjualan ikan memberikan kesempatan bagi pedagang untuk menabung serta meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.

⁶⁶ Rahmat Doni, *Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*, Wawancara Pukul 16:15 WIB, 12 April, 2025

b) Hambatan Berdagang Ikan

Di sisi lain, para pedagang juga menghadapi sejumlah hambatan dalam menjalankan usahanya. Hambatan utama adalah ketidakstabilan pendapatan, karena jumlah pembeli tidak selalu sama setiap hari. Kondisi pasar yang kadang ramai dan kadang sepi menyebabkan penghasilan tidak menentu, sehingga pada waktu tertentu pendapatan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian.

Hambatan lainnya berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga, seperti jumlah anak yang harus dinafkahi, sehingga penghasilan yang diperoleh terasa kurang mencukupi. Selain itu, pedagang harus berpikir kreatif untuk mencari tambahan penghasilan atau strategi usaha ketika penjualan sedang sepi agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan pedagang kaki lima masih seimbang dengan pengeluaran harian dan dari penghasilan berjualan juga dapat di modalkan kembali. Namun, terdapat kerentanan ketika pendapatan menurun, yang mengharuskan mereka mengatur ulang pengeluaran atau menggunakan simpanan. Ini menunjukkan pentingnya pendampingan usaha, manajemen keuangan, dan dukungan dari pihak terkait untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga.

c. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Proses pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan yaitu dari sudut pandang pemerintah daerah, pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Padangsidempuan sendiri adalah dengan pengadaan tenda yang sistemnya bongkar pasang

dimana nantinya PKL akan dapat secara Cuma cuma dan terordinir secara acak oleh pemerintah guna mengantisipasi tata perkotaan yang aman dan bersih.

Wawancara dengan bu Mahyuni Mardia Dinas Perdagangan Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa: “Kami dari dinas telah melaksanakan beberapa program, di antaranya pelatihan kewirausahaan dasar, pengelolaan keuangan mikro, dan pelatihan keamanan pangan sehingga pedagang kaki lima bisa tertib.”⁶⁷

Meskipun pihak Dinas Perdagangan Kota Padangsidempuan melalui wawancara dengan Ibu Mahyuni Mardia menyampaikan bahwa telah dilaksanakan beberapa program, diketahui bahwa pelatihan tersebut hanya diikuti oleh pedagang yang memiliki kios tetap. Program pemberdayaan yang dirancang pemerintah belum sepenuhnya menyentuh pedagang kaki lima yang beraktivitas di ruang publik tanpa izin atau tempat tetap. Akibatnya, PKL masih belum memperoleh peningkatan kapasitas dalam hal manajemen usaha, kebersihan pangan, dan penataan tempat berdagang.

Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa sebagian besar PKL tetap memilih berjualan di fasilitas umum meskipun pemerintah telah menyediakan lokasi relokasi.

Wawancara dengan bu Siti Aisyah, salah satu pedagang kaki lima yang aktif berjualan mengatakan bahwa: “Saya berjualan di pinggiran

⁶⁷ Mahyuni Mardia, *Dinas Perdagangan*, Wawancara Pukul 10:00 WIB, 13 April, 2025

jalan karena lebih mudah untuk di akses pembeli sehingga pembeli lebih banyak berdatangan dan tentu saja pendapatan saya lebih banyak.”

Penataan pedagang kaki lima yaitu suatu langkah yang dipilih untuk menertibkan dan menata perkotaan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan dari adanya pedagang kaki lima dengan menata maupun relokasi tanpa menghilangkan keberadaan pedagang kaki lima yang sudah menjadi sumber ekonomi bagi perkotaan. Dalam menentukan penataan mengenai pedagang kaki lima (PKL) terdapat komponen-komponen yang perlu diperhatikan seperti lokasi, waktu berdagang, sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan, serta pola penyebaran dan pelayanan pedagang kaki lima.

Wawancara dengan bu Reni Cahaya Dinas Perdagangan Kota Padangsidimpuan mengatakan bahwa: “Kami melakukan penertiban sesuai dengan peraturan daerah, khususnya terkait penggunaan trotoar dan badan jalan. Tapi kami selalu mengedepankan pendekatan persuasif, bukan langsung represif.”⁶⁸

Pemberdayaan yang dilakukan pada pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Padangsidimpuan ini adalah tahap awal dengan persiapan terhadap pendekatan yang akan dilakukan kepada pedagang kaki lima dengan cara pemerintah daerah menempatkan posisi mereka kedalam lingkungan pedagang kaki lima sebagai sasaran

⁶⁸ Reni Cahaya, *Dinas perdagangan*, Wawancara Pukul 10:30 WIB, 13 April , 2025.

program pemberdayaan, sehingga pedagang kaki lima dapat berpartisipasi dalam ketertiban yang ada. Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui dinas terkait berencana melakukan pendekatan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) berbasis komunitas, di mana setiap kelompok PKL akan dibentuk dan didampingi secara khusus. Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun rencana Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui dinas terkait berencana melakukan pendekatan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) berbasis komunitas, di mana setiap kelompok PKL akan dibentuk dan didampingi secara khusus. Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun rencana pembangunan sentra PKL yang strategis dan layak sebagai upaya penataan yang lebih terarah. Tidak hanya fokus pada pelatihan, pemberdayaan ini juga akan diperluas dengan memperkuat kerja sama lintas instansi agar mencakup aspek pemasaran dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil.

Wawancara dengan bu Reni Cahaya Dinas Perdagangan Kota Padangsidimpuan mengatakan bahwa:

Kami berencana melakukan pendekatan berbasis komunitas. Jadi, setiap kelompok PKL akan dibentuk dan didampingi secara khusus. Selain itu, kami sedang menyusun rencana pembangunan sentra PKL yang strategis dan layak. Kami juga ingin memperkuat kerja sama lintas instansi agar pemberdayaan ini tidak hanya sebatas pelatihan, tapi juga mencakup pemasaran dan perlindungan hukum usaha kecil.⁶⁹

⁶⁹ Reni Cahaya, *Dinas perdagangan*, Wawancara Pukul 10:30 WIB, 13 April, 2025.

Dinas perdagangan juga bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja (satpol PP) kota Padangsidempuan untuk patrol terhadap ketertiban para pedagang kaki lima hal ini juga termasuk salah satu aktifitas yang di lakukan dinas perdagangan untuk pemberdayaan pedagang kaki lima agar lebih tertib dan teratur seperti hasil wawancara dengan bu Mahyuni Mardia Dinas Perdagangan Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa:

Tujuan pemberdayaan adalah karena beragam untuk definisi berbagai konsep pemberdayaan. Secara umum, tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dijelaskan bahwa pedagang kaki lima di kota Padangsidempuan secara umum dapat memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam berdagang sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup para pedagang kaki lima di kota Padangsidempuan Pemberdayaan pedagang kaki lima khususnya di kota Padangsidempuan adalah sebagai salah satu aset pendapatan sehingga harus diakui bahwa upaya pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bukanlah hal yang mudah namun tidak masalah kecuali pasti ada solusinya. Memang, pemerintah kota maupun daerah pada akhirnya tidak bisa sendirian dalam penuntasan permasalahan PKL ini, perlu bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat kota, dan maupun dengan pedagang itu sendiri.

2. Hambatan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan

Pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup kompleks, baik dari sisi internal pedagang maupun dari sisi kebijakan pemerintah. Beberapa pedagang masih mengalami keterbatasan modal, minim akses terhadap pinjaman usaha, serta kurangnya pengetahuan dalam mengelola usaha secara profesional. Di samping itu, rendahnya partisipasi pedagang dalam program pelatihan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya tertib berdagang juga menjadi tantangan tersendiri. Dari sisi pemerintah, keterbatasan anggaran dan infrastruktur serta belum optimalnya koordinasi lintas instansi menyebabkan program pemberdayaan belum berjalan maksimal.

Penataan lokasi yang dianggap kurang strategis dan sering tidak melibatkan pedagang dalam perencanaannya juga menimbulkan resistensi, bahkan penolakan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan agar upaya pemberdayaan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan para pedagang kaki lima secara nyata.

Wawancara dengan bu Mahyuni mardia Dinas Perdagangan Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa: “Tantangan terbesar dalam menata PKL adalah keterbatasan ruang publik yang bisa dimanfaatkan. Kami sedang menyusun masterplan lokasi khusus untuk PKL, agar mereka tidak berjualan di trotoar atau badan jalan. Ini akan kami sesuaikan dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah.”⁷⁰

Wawancara dengan bu Mahyuni Mardia Dinas Perdagangan Kota Padangsidimpuan mengatakan bahwa:

Minimnya pemahaman dari para pedagang kaki lima menjadi salah satu faktor yang menyulitkan upaya pengkondisian mereka dalam proses pemberdayaan. Selain itu, keterbatasan lokasi yang tersedia untuk menampung para pedagang, khususnya di area Jalan Thamrin, Jalan Patric Lumumba dan Jalan Mongonsidi turut menjadi hambatan. Akibatnya, keberadaan pedagang kaki lima yang kerap mengganggu ketertiban dan kebersihan kota menjadi sulit untuk ditata secara optimal.⁷¹

Salah satu permasalahan yang dihadapi Kota Padangsidimpuan adalah PKL. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah No. 41 Tahun 2003 tentang larangan PKL berjualan di trotoar jalan, bahu jalan, dan taman. PKL yang ketahuan melanggar, diberikan himbauan untuk tidak melakukannya lagi dan No 08 Tahun 2005 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di kota Padangsidimpuan. Sat Pol PP mengarahkan PKL pindah ketempat lokasi yang sudah ditentukan atau diperuntukan oleh para PKL sehingga tidak mengganggu manfaat fasilitas umum. Hal yang sudah dilakukan oleh Dinas Tata Kota untuk memberdayakan PKL adalah dengan melakukan pendataan jumlah PKL yang resmi dan tidak resmi.

Kemampuan dalam mengelola usaha PKL harus lebih inovatif yaitu dengan cara melihat produk apa yang dicari oleh masyarakat atau mencari barang yang update pada zaman ini. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang

⁷⁰ Mahyuni mardia, *Dinas perdagangan*, Wawancara Pukul 10:00 WIB, 13 April, 2025.

⁷¹ Mahyuni Mardia, *Dinas perdagangan*, Wawancara Pukul 10:00 WIB, 13 April, 2025.

umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang harus dihadapi diantaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya Perda yang melarang keberadaan mereka.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara seperti yang diuraikan sebelumnya menunjukkan Mayoritas PKL dalam penelitian ini berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Mereka memilih berjualan di kaki lima karena keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal dan kebutuhan mendesak untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Jenis barang dagangan yang dijual sangat bervariasi, mulai dari makanan siap saji, pakaian, aksesoris, hingga barang kebutuhan pokok.

PKL di Padangsidempuan rata-rata bekerja lebih dari 10 jam per hari tanpa jaminan kesehatan, pensiun, ataupun asuransi ketenagakerjaan. Meskipun usaha mereka bersifat informal, kontribusi PKL terhadap ekonomi lokal sangat signifikan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan sektor mikro ekonomi. Para pelaku PKL menyatakan mereka terpaksa berjualan di lokasi tersebut dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan bagi orang yang sudah berkeluarga terutama

seorang ibu rumah tangga oleh karena itu mereka tidak punya pilihan lain selain berjualan di piggir jalan.

Modal awal yan mereka gunakan untuk berjualan bervariasi dilihat dari jenis dagangan mereka karena jenis dagangan yang berbeda setiap pedagang karna ada yang menjual sayur, jajanan, pakaian dan lainnya dan penghasilan yang mereka dapatkan pun berbagai macam dari yang Rp.200.000- Rp.900.00 per harinya dilihat dari jenis dagangan mereka dan sebagai pedagang PKL mengaku penghasilan yang mereka dapatkan cukup untuk kebutuhan sehari-hari naun ada juga yang mengaku kurang namun itu terjadi ketika dagangan sedng sepi.

Kegiatan berjualan sebagai pedagang kaki lima (PKL) memiliki kontribusi yang nyata dan signifikan terhadap peningkatan penghasilan keluarga. Meskipun berada dalam sektor informal, sebagian besar PKL yang diwawancarai menyatakan bahwa usaha dagang mereka merupakan sumber utama pendapatan keluarga dan menjadi penopang ekonomi rumah tangga secara langsung.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyak PKL adalah perempuan, terutama ibu rumah tangga, yang membantu ekonomi keluarga. Aktivitas berjualan memberikan mereka akses terhadap pendapatan tanpa harus meninggalkan rumah sepenuhnya, namun banyak juga PKL yang laki- laki terutama berjualan adalah mata pencarian utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. berjualan sebagai pedagang kaki lima merupakan strategi penting dalam meningkatkan penghasilan dan

stabilitas ekonomi keluarga, terutama bagi kelompok masyarakat kelas bawah dan menengah di Kota Padangsidempuan. Meskipun sektor ini berada dalam ranah informal, perannya dalam memberdayakan keluarga sangat nyata.

Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa Pendapatan adalah kenaikan modal perusahaan akibat penjualan produk perusahaan. pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian.⁷² Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula.

Terkait lokasi berdagang sebagian besar PKL memilih lokasi yang dinilai strategis, memiliki arus lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan yang tinggi, serta dekat dengan pusat kegiatan masyarakat. Hal ini tentu mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang. Namun, pemilihan lokasi yang dilakukan secara informal dan tidak melalui izin resmi menyebabkan munculnya beberapa permasalahan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat umum.

⁷² Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 47

Aspek lokasi merupakan salah satu faktor krusial dalam mendukung keberlangsungan usaha pedagang kaki lima. Pedagang umumnya menggunakan trotoar, bahu jalan, bahkan selokan sebagai tempat usaha, yang tidak hanya mengganggu fungsi fasilitas umum tetapi juga menimbulkan masalah ketertiban dan kebersihan lingkungan. Ketidaksesuaian ini menyebabkan pemerintah kerap Pedagang melakukan penertiban yang sifatnya sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah. Di sisi lain, PKL merasa bahwa kebijakan relokasi tidak mempertimbangkan faktor ekonomi dan mobilitas konsumen.

Pedagang mengaku terus berjualan di lokasi karena tempat ramai dan banyak pembeli sehingga sangat menguntungkan bagi penjual di samping itu juga karena tidak perlu menyewa ruko mahal yang menjadi salah satu alasan PKL Tetap terus berjualan. PKL yang berjualan di jalan-jalan utama atau dekat pusat aktivitas sosial umumnya memperoleh pendapatan lebih tinggi dibandingkan mereka yang berjualan di lokasi yang terpencil atau telah direlokasi.

Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa Lokasi merupakan letak toko atau pengecer pada daerah yang strategis sehingga dapat memaksimalkan laba. Lokasi yang baik dapat memudahkan penyedia jasa berhasil dalam menjalankan usahanya, menurut Swastha lokasi adalah tempat dimana suatu usaha atau aktivitas usaha dilakukan. Faktor penting dalam pengembangan suatu usaha adalah letak lokasi terhadap daerah perkotaan, cara pencapaian dan waktu tempuh lokasi

tujuan. Faktor lokasi yang baik relatif untuk setiap jenis usaha yang berbeda. Pemilihan lokasi mempunyai fungsi yang strategis karena dapat ikut menentukan tercapainya tujuan badan usaha.⁷³

Terkait dengan pemberdayaan PKL di Padangsidimpuan berada dalam tahap awal dan menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Meskipun pemerintah daerah telah menunjukkan niat untuk membina sektor informal ini, kenyataannya banyak program pemberdayaan yang belum berjalan secara optimal, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun dampaknya terhadap peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial para PKL.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Padangsidimpuan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, infrastruktur, maupun kapasitas usaha. Secara umum, strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan lembaga terkait belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlangsungan usaha para PKL. Kebijakan yang ada juga cenderung bersifat jangka pendek tanpa solusi pemberdayaan yang berkelanjutan.

Sebagian besar PKL menyatakan kesulitan mengakses sumber pembiayaan formal seperti kredit usaha rakyat (KUR) karena tidak memiliki agunan dan legalitas usaha. Di sisi lain, program pelatihan

⁷³ Swastha, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Indeks, 2020), hlm56.

kewirausahaan yang disediakan pemerintah masih terbatas dan belum menjawab kebutuhan riil pedagang, seperti manajemen keuangan, pemasaran digital, dan peningkatan kualitas produk. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak lokasi PKL tidak memiliki fasilitas dasar yang memadai seperti tempat sampah, drainase, atau penerangan. Hal ini tidak hanya mengurangi kenyamanan konsumen, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja para PKL. Penataan ruang kota belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan PKL sebagai bagian dari ekonomi rakyat.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui dinas terkait telah meluncurkan beberapa program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan wirausaha, pengelolaan keuangan mikro, dan sosialisasi pentingnya legalitas usaha. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, sebagian besar PKL menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan tersebut, atau jika pernah, materi yang disampaikan tidak relevan dengan kebutuhan nyata mereka. Namun sering kali satpol PP Sselalu mengawasi setiap aktifitas para pelaku KKL agar tetap tertib dan tidak terjadi kekacauan di sekitar tempat berdagang dan beberapasosialisai terhadap para pelaku PKL.

Sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka,

untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri.⁷⁴ Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat dapat menjalankan pembangunan dengan diberikan hak untuk mengelola sumber daya yang ada.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap penelitian ini menunjukkan bahwa ya pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padangsidimpuan belum berjalan secara optimal. Program-program yang ada masih bersifat terbatas, tidak merata, dan kurang melibatkan PKL secara langsung dalam proses perencanaan dan evaluasi. Meskipun demikian, PKL menunjukkan potensi dan semangat tinggi untuk berkembang. Untuk itu, diperlukan pendekatan pemberdayaan yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, guna meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan ekonomi para PKL.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan Pemerintahan Kota Metro sudah melakukan pemberdayaan namun belum maksimal. Pemkot harus terus berinovasi dalam memperdayakan PKL Kota Metro. Pemberdayaan pedagang Kaki Lima di Pasar Cendrawasih kota Metro, antara lain: Pemkot secara perlahan sudah bekerjasama dengan koperasi untuk meningkatkan akses pasar untuk membantu peningkatan akses permodalan, setiap event Pemkot sudah bekerjasama kepada PKL untuk memasarkan produk Kota Metro khususnya bidang kuliner⁷⁵

⁷⁴ Eko Susanto. *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro*. (Metro : Laduni Press 2019), hlm 11

⁷⁵ Eko Susanto, *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro (Studi Kasus di Pasar*

2. Hambatan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan

Berdasarkan hasil wawancara seperti yang diuraikan, Pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di sektor informal. Namun, di Kota Padangsidempuan, proses pemberdayaan ini masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas dan keberlanjutannya. Hambatan-hambatan ini berasal dari berbagai aspek, baik dari sisi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan maupun dari sisi PKL sebagai sasaran program.

a. Terbatasnya sarana dan prasarana

Salah satu hambatan signifikan dalam pemberdayaan PKL di Kota Padangsidempuan adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang layak dan memadai bagi kegiatan usaha mereka. Banyak PKL masih berjualan di tempat yang sempit, tidak permanen, dan tanpa fasilitas dasar seperti tempat sampah, akses air bersih, listrik, dan sistem *drainase*.

Kondisi ini tidak hanya mengurangi kenyamanan konsumen dan menghambat kelancaran usaha, tetapi juga membuat PKL sulit meningkatkan kualitas layanan dan kebersihan. Kurangnya fasilitas seperti tenda yang tahan cuaca, meja dan kursi standar, serta pencahayaan yang memadai juga berdampak pada rendahnya daya tarik tempat usaha PKL.

Beberapa titik yang disediakan pemerintah, fasilitas penunjang sering kali dalam kondisi rusak atau tidak terawat. Selain itu, lokasi usaha yang dialokasikan terkadang tidak memiliki akses transportasi dan pasar yang baik, sehingga tidak menguntungkan secara ekonomi.

Ketiadaan sarana penunjang ini mencerminkan lemahnya perhatian terhadap aspek infrastruktur pendukung sektor informal, yang padahal sangat penting untuk menunjang keberhasilan program pemberdayaan.

b. Modal Usaha

Banyak PKL mengandalkan modal sendiri yang terbatas, dan sebagian besar tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti bank atau koperasi. Salah satu hambatan paling krusial yang dihadapi PKL di Kota Padangsidimpuan adalah kesulitan dalam mengakses modal usaha. Modal merupakan faktor penting dalam pengembangan dan keberlanjutan kegiatan ekonomi, namun mayoritas PKL tidak memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memperluas atau menstabilkan usaha mereka.

c. Kurangnya Informasi dan Sosialisasi Program

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya sosialisasi program pemberdayaan kepada para PKL. Banyak dari mereka tidak mengetahui adanya program pelatihan, bantuan permodalan, maupun kebijakan relokasi yang disiapkan pemerintah. Kurangnya

informasi ini menyebabkan banyak PKL tidak terlibat dalam program yang seharusnya bisa membantu pengembangan usaha mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha informal. Minimnya penyebaran informasi berdampak langsung pada rendahnya tingkat partisipasi dan efektivitas program.

d. Rendahnya Partisipasi PKL dalam Perencanaan Program

PKL di Padangsidimpuan belum banyak dilibatkan dalam proses perumusan atau perencanaan program pemberdayaan. Sebagian besar kebijakan bersifat top-down, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi riil para pedagang. Akibatnya, banyak program yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Keterlibatan langsung pelaku usaha sangat penting agar program benar-benar menjawab persoalan yang mereka hadapi di lapangan. Tanpa partisipasi, program cenderung tidak berkelanjutan dan kurang mendapat dukungan dari sasaran penerima manfaat.

e. Tidak Ada Pendampingan yang Berkelanjutan

Pemberdayaan tidak bisa berjalan efektif hanya melalui pelatihan satu kali atau bantuan sesaat. Namun, di Padangsidimpuan, sebagian besar program yang sudah berjalan tidak disertai dengan pendampingan dan evaluasi lanjutan. PKL tidak mendapatkan bimbingan teknis atau mentoring untuk

memastikan bahwa mereka bisa mengaplikasikan ilmu atau memanfaatkan bantuan secara maksimal. Akibatnya, hasil dari program pemberdayaan tidak berkelanjutan dan tidak menghasilkan dampak jangka panjang terhadap usaha mereka.

f. Rendahnya Literasi Usaha dan Teknologi

Sebagian besar PKL di Padangsidempuan masih memiliki keterbatasan dalam hal manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital. Mereka belum mampu mengakses pasar secara daring atau memanfaatkan sistem pembayaran non-tunai, padahal tren ini semakin dibutuhkan. Tanpa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, PKL akan tertinggal dan sulit bersaing dengan pelaku usaha modern.

D. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih memiliki kekurangan karena adanya keterbatasan penelitian yang diantaranya:

1. Penelitian ini hanya melibatkan sejumlah PKL di beberapa titik lokasi di Kota Padangsidempuan yang dianggap representatif. Oleh karena itu, hasil temuan belum sepenuhnya mewakili seluruh PKL di kota ini, khususnya yang berada di wilayah pinggiran atau lokasi yang tidak terjangkau selama proses pengumpulan data.
2. Penelitian ini berfokus pada identifikasi hambatan secara umum, sehingga belum mengkaji secara mendalam efektivitas dari masing-

masing bentuk intervensi pemberdayaan seperti pelatihan, bantuan modal, atau relokasi. Studi lebih lanjut dengan fokus yang lebih spesifik sangat diperlukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tajam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padangsidimpuan masih belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan beberapa program seperti pelatihan usaha, bantuan peralatan, dan relokasi ke lokasi tertentu, Meskipun demikian, para PKL menunjukkan antusiasme dan keinginan kuat untuk berkembang. Hasil Penelitian menyimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Padangsidimpuan dalam ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Padangsidimpuan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, infrastruktur, maupun kapasitas usaha.
2. Hambatan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Padangsidimpuan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padangsidimpuan masih menghadapi berbagai hambatan yang menghambat efektivitas dan keberlanjutan program. Hambatan-hambatan tersebut mencakup kurangnya informasi dan sosialisasi program pemberdayaan, terbatasnya akses terhadap modal usaha, minimnya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya literasi usaha, serta tidak optimalnya koordinasi antarinstansi pemerintah yang terkait.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka saran diambil perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Kepada PKL disarankan untuk secara aktif mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga lain guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola usaha.
2. Pengetahuan mengenai manajemen keuangan, pemasaran digital, serta pengelolaan sumber daya dapat membantu PKL dalam meningkatkan daya saing .
3. Untuk akademik sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan tentang PKL sebaiknya melibatkan pendekatan interdisipliner, menggabungkan ilmu sosial, ekonomi, hukum, dan kebijakan publik. Ini akan memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai dinamika pemberdayaan PKL dan bagaimana aspek-aspek tersebut saling terkait.
4. Kepada peneliti lain untuk mengembangkan hasil penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmat, Mira Mirnawati, "Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat", *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, hlm, 65.
- Afrial, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.21
- al Fayyadl, G. F., & Nefianto, T. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. *Res Publica: Journal of Social Policy Issues*, 1(1), 28-38.
- Alfian Yusri, *Statistik Daerah Kecamatan Paangsidimpuan Utara*, (Jakarta: Badan Pusat Sttistik Kota Padangsidimpuan, 2022), hlm.4
- Amirullah, Dkk,Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Pasar Sunday Morning (Sunmor) Purwokerto. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 21(2). <https://doi.org/10.32424/jeba.v21i2.1328>, (2019), hlm, 19.
- Ana Fatma Fitriana Wibowo, "Pendapatan Pedagang Kaki Lima dan Faktor yang Mempengaruhi, *Journal of Economic,Business, and Engineering (JEBE)*, Vol. 2, No. 2, April 2021, hlm, 207.
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 7–8.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*,(Bandung, Pustaka Setia, 2014), hlm. 31.
- Dadang Supriatna, "Penata Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satpol PP dalam Upaya Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lalu Lintas dan Pejalan Kaki pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari", *Jurnal Tatapamong*, Vol. 3 No. 1, Maret 2021, hlm. 3
- David Cardona, *Strategi KomunikasiPembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 33-34.
- Dedeh Maryani dan Ruth Roselin, "Pemberdayaan Masyarakat", (Yogyakarta: Publisher, 2019), hlm. 1
- Djam'an Satori, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Desember 2017, hal 105.
- E. Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017). Vol. 6, No. 1, Februari 2020, hlm. 146.

- Efri Samsul Bahri, “*Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan*”, (Kediri: FAM Publishing, 2019), hlm. 9.
- Eko Susanto, *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro (Studi Kasus di Pasar Cendrawasih Kota Metro)*, (Skripsi, IAIN Metro, 2019).
- Eko Susanto. *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro*. (Metro : Laduni Press 2019), hlm 11.
- Fazar Nur’aini Dwi Fatimah, *Teknik Analisis Swot*, Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2016, hlm. 170-175.
- Gajanayake, H. (2019, July 17). *Medium*. Diambil kembali dari Medium: <https://uxplanet.org/principles-of-design-thinking-stages-of-design-thinking-b2cc219063ac>, hlm, 34.
- Hani Ruchendi, “Penanganan Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Subang”, *Jurnal Omnicom Unsub*, Vol. 5 , No. 2, November 2019, hlm. 18.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm, 218.
- Indraddin, W. P., & Hanandini, D. (2022). Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Kepentingan Pedagang, Ketertiban dan Keindahan Kota. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 12(1).
- J. U. Lesnussa, “Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong Baguala Ambon”, *Jurnal Sosio Sains*, Vol. 5, No. 2, hlm. 108–114.
- Kasdi, Abdurrohman. "Filantropi Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat (Model pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 9.2 (2016): hlm. 227-245.
- Kiki Endah, “Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa”, *Jurnal MODERAT*, VoL, 3, 2019, hlm, 56.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 103.
- M. Syahrani Jailani, Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal PEJ*, 4 (2), Desember 2020, hlm, 19 – 23

- Mahyuni mardia, *Dinas perdagangan*, Wawancara Pukul 10:00 WIB, 13 April , 2025.
- Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 26.
- Marwadani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta:Deepublish, 2020), hlm. 50.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, hlm, 78.
- Nabila, Aisya Safira, and Ertien Rining Nawangsari. “Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sentra Wisata Kuliner Wiyung Kota Surabaya”. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 8.1 (2022): 135-144.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2013), hlm. 143.
- Omar, Osama. Halabi, Marwan. (2015) “*Ways Of Innovating In Education For Sustainable Design Principles*”, diakses tanggal 17 Januari 2021, hlm, 04.
- Pujani Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 209.
- Rahman Dano Mustafa Dkk, Strategi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Dalam Mempertahankan Usahanya Di Lapak Mangga Dua Kota Ternate, *Jurnal Manajemen & Bisnis* , Vol. 7, No. 2, Hal 103-114, hlm, 111.
- Reni Cahaya, *Dinas perdagangan*, Wawancara Pukul 10:30 WIB, 13 April , 2025.
- Rokhim, F., dan Handoyo, P., 2019, Makna Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Yayasan Bina Karya “Tiara Handicraft” Surabaya, *Jurnal Paradigma*. Vol 03, No 03, hlm. 1-9
- Rokhimah, dkk, “Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima Selama Masa Pembukaan Alun-Alun Aimas Kabupaten Sorong,” *Jurnal Kalianda Halok Gagas* Vol 5, No 2, Januari 2023, hlm. 137.
- Rusydiana, Aam Slamet. “Krisis Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam Pemberdayaan Ekonomi Umat dari Perspektif Islam.” *Harmoni* 12.2 (2013): hlm. 21-30.
- Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011)6, hlm. 47

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019), hlm, 91.

Siti Saskia Fernandya Dkk, ” *Pengentasan Masalah Sosial Melalui People Centered Development Guna Memaksimalkan Pembangunan di Indonesia* ”, *Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), hlm, 121- 132.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif R&D*, hlm 275.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hlm. 7.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm,36

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta, hlm, 136.

Sunyoto Usman, “*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*”, (Ctk:VII, April 2020). Celeban Timur:Yogyakarta, hlm, 12-13.

Swastha, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Indeks, 2020), hlm56.

Utama, Rony Edward. "Strategi pembiayaan pesantren melalui pemberdayaan ekonomi umat." *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam* 5.2 (2020): 117-134.

Yohanes Cristanto Nugraha, *Pemanfaatan Ruang Publik Pedestrian Sebagai Tempat Berdagang Bagi Pedagang Kaki Lima (Studi Di Kawasan Pedestrian Sudirman Kota Palembang*, (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2021), hlm. 5

Yonan Bastiar Dkk, (2022). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2022. *Jurnal GOVERNANSI*, 8(2): 79-90.

Yunus Winoto, dan Tine Silvana Rachmawat, “Pemberdayaan Masyarakat (community empowerment) Melalui Pengelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA* 2017 ISBN 978-602-19411-2-6, hlm, 199.

Zubedi, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta; Prenadamedia Grup, 2016) hlm 24

Zulkaidir, *Tafsir Zulkaidir*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2021), hlm. 56